

PENYELENGGARAAN PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN SEKTOR PARIWISATA

**(Studi tentang Penyelenggaraan Peran Dinas Pariwisata, Kebudayaan,
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar dalam Pengembangan Kawasan
Wisata Penataran)**

SKRIPSI

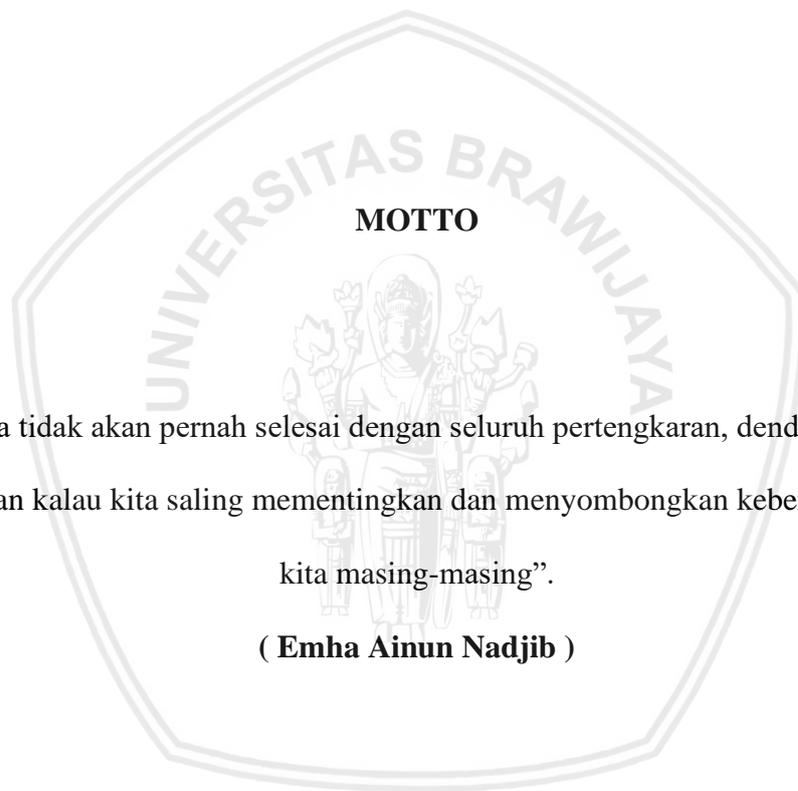
**Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana pada Fakultas Ilmu
Administrasi Universitas Brawijaya**

**HAPPY EVRYDA KANATA
155030107111034**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG**

2019



MOTTO

“Kita tidak akan pernah selesai dengan seluruh pertengkaran, dendam dan kebencian kalau kita saling mementingkan dan menyombongkan kebenaran versi kita masing-masing”.

(Emha Ainun Nadjib)

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Penyelenggaraan Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Sektor Pariwisata (Studi tentang Penyelenggaraan Peran Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar dalam Pengembangan Kawasan Wisata Penataran).

Disusun oleh : Happy Evryda Kanata

NIM : 155030107111034

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Prodi : Ilmu Administrasi Publik

Malang, 17 Juli 2019

Ketua Komisi Pembimbing,

Anggota Komisi Pembimbing,



Dr. Suryadi, MS
NIP. 19601103 198703 1 003



Nana Abdul Aziz, S.AP., M.AP
NIP. 19840713 201504 1 004

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, Juni 2019

Mahasiswa,

METERAI
TEMPEL
1AF99AFF455534793

6000
ENAM RIBU RUPIAH

Happy Evryda Kanata
NIM.155030107111034

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi Fakultas Ilmu
Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Kamis
 Tanggal : 11 Juli 2019
 Waktu : 12.00 – 13.00 WIB.
 Skripsi atas nama : Happy Evryda Kanata
 Judul : Penyelenggaraan Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Sektor Pariwisata (Studi tentang Penyelenggaraan Peran Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar dalam Pengembangan Kawasan Wisata Penataran).

dan dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua



Dr. Suryadi, MS
NIP. 19601103 198703 1 003

Anggota



Nana Abdul Aziz, S.AP., M.AP
NIP. 19840713 201504 1 004

Anggota



Ali Maskur, S.AP., M.AP., MA
NIP. 19860716 201404 1 001



HALAMAN PERSEMBAHAN

“SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN UNTUK IBU DAN BAPAK SAYA. HARAPAN MEREKALAH SATU-SATUNYA ALASAN SAYA UNTUK BERSEDIA KULIAH DAN MENYELESAIKAN SKRIPSI INI”.



Happy Evryda Kanata, 2019. **Penyelenggaraan Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Sektor Pariwisata (Studi tentang Penyelenggaraan Peran Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar dalam Pengembangan Kawasan Wisata Penataran)**. Skripsi. Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Dosen Pembimbing : Dr.Suryadi, MS dan Nana Abdul Aziz, S.AP., M.AP. 138 halaman + xv.

RINGKASAN

Pengembangan pariwisata merupakan suatu bentuk kegiatan untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan fasilitas pariwisata yang meliputi komponen-komponen utama pariwisata seperti atraksi, aksesibilitas, amenities dan pelayanan tambahan. Pengembangan Kawasan Wisata Penataran merupakan salah satu kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Blitar. Salah satu pihak yang memiliki wewenang dalam pengembangan Kawasan Wisata Penataran ini adalah Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang berlokasi di Kabupaten Blitar, sedangkan situsnya berada di Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar serta di Kawasan Wisata Penataran. Sumber data dari penelitian ini meliputi data primer yang diperoleh dari beberapa wawancara terhadap informan yang berkaitan, dan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data penelitian ini melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan instrumen penelitiannya adalah peneliti sendiri dan beberapa alat penunjang seperti pedoman wawancara, dan alat bantu lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar dalam pengembangan Kawasan Wisata Penataran berdasarkan tupoksinya berperan dalam hal perumusan kebijakan teknis yang dilakukan dengan merumuskan *master plan* pengembangan Kawasan Wisata Penataran, penyelenggaraan urusan pelayanan umum yang dilakukan dengan melakukan pemenuhan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pariwisata serta dalam hal pembinaan di bidang pariwisata yang dilakukan dengan membina Pokdarwis “Majapahit” Desa Penataran.

Happy Evryda Kanata, 2019. The Implementation of Local Government's Roles in Tourism Sector Development (**Study about Implementation of Tourism, Culture, Youth and Sports Department of Blitar's Roles in The Development of Penataran Tourism Area**). Undergraduate Thesis. Science Department of Public Administration, Faculty of Administrative Science, Brawijaya University. Advisor Lecturer : Dr.Suryadi, MS., Nana Abdul Aziz, S.AP., M.AP. 138 pages + xv

SUMMARY

The development of tourism sector is an activities to improve any facilities of tourism objects and to provide the main of tourism components, there are attractions, accessibility, amenities and ancillary service. Development of Penataran Tourism Area is one of the programs from the Local Government of Blitar Regency. One of the stakeholders who's has the roles in the the development of Penataran Tourism Area is Tourism, Culture, Youth and Sports Department of Blitar.

This research uses descriptive research type with qualitative approach located in Blitar Regency, with the site in Tourism, Culture, Youth and Sports Department of Blitar and Penataran Tourism Area. Primary data sources were obtained from interviews from related informants, while secondary data were obtained from documents relating to the research topic. Data collection techniques through interviews, observation and documentation. While the research instrument is the researcher himself, and some supporting tools such as interview guides, and other aids.

The results showed if The Tourism, Culture, Youth and Sports Department of Blitar in the development of Penataran Tourism Area has some roles which is implemented about makes a Penataran Tourism Area's master plan, providing and improve any facilities, which is include any tools and infrastructures in Penataran Tourism Area. Tourism, Culture, Youth and Sports Department of Blitar also implemented a role about human resource development, which is implemented with some training programs for the Travel Conscious Group in Penataran Village. Basically, the roles were implemented based on the main functions of The Tourism, Culture, Youth and Sports Department of Blitar.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Robbil ‘Alamiin. Puji syukur Penulis sampaikan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta’ala yang senantiasa memberikan limpahan nikmat dan hidayatuttaufiq kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Sholawat serta salam semoga senantiasa dihaturkan kepada Rasulullah Muhammad Shollalloohu ‘Alaihi Wasallam, yang atas izin Allah curahan syafaatnya senantiasa kita harapkan sepanjang hayat.

Penulis untuk skripsi ini mengambil judul “Penyelenggaraan Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Sektor Pariwisata (Studi tentang Penyelenggaraan Peran Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar dalam Pengembangan Kawasan Wisata Penataran)”. Penyusunan skripsi ini ditujukan dalam rangka memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana di Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.

Penulis sangat menyadari berbagai kekurangan dan kelemahan Penulis, maka Penulis juga menyadari bahwa tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak terkait maka sangat dimungkinkan proses penulisan skripsi ini tidak akan berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, Penulis menyampaikan terima kasih banyak kepada :

1. Ibu dan Bapak dari Penulis yang senantiasa mendoakan dan memotivasi Penulis dalam berbagai hal dalam kehidupan Penulis;
2. Seluruh saudara, keluarga dan sahabat Penulis yang senantiasa memberikan dukungan kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
3. Bapak Prof.Dr.Bambang Supriyono, MS., selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya;
4. Bapak Drs.Andy Fefta Wijaya, MDA.,Ph.D., selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik;

5. Bapak Dr.Fadillah Amin, M.AP., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik;
6. Bapak Dr.Suryadi, MS dan Bapak Nana Abdul Aziz, S.AP., M.AP., selaku dosen pembimbing skripsi Penulis yang senantiasa dengan penuh kesabaran membimbing Penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini;
7. Seluruh staf, karyawan dan dosen di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
8. Seluruh ajaran Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar:
9. Zaka, Syihab, Anwar, Pras, Faris, Arip, Bako, Jefry, Robertus, Wahyu, Brilly serta kawan-kawan Penulis lainnya yang senantiasa memberikan dukungan dan bantuan kepada Penulis dalam berbagai hal selama berkuliah di FIA UB;
10. Serta semua pihak lainnya yang telah berkontribusi dalam pengerjaan skripsi ini.

Demikian pengantar dari skripsi ini saya sampaikan, tentu dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan dari Penulis. Oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak akan sangat bermanfaat bagi Penulis. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang membacanya.

Malang, 23 Juni 2019

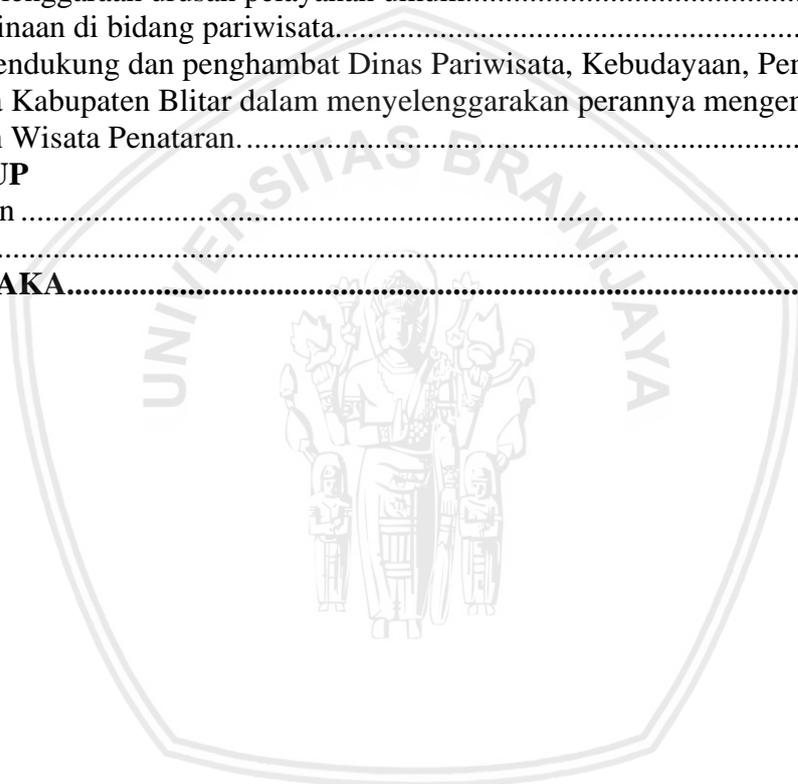
Penulis,

Happy Evryda Kanata

DAFTAR ISI

MOTTO	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
RINGKASAN	vii
SUMMARY	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kontribusi Penelitian.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Teori Peran	12
B. Pemerintah Daerah	15
1. Pengertian Pemerintah Daerah	15
2. Kewenangan dan Fungsi Pemerintah Daerah	16
C. Konsep Pariwisata	19
1. Pengertian Pariwisata.....	19
2. Jenis Pariwisata.....	20
3. Sarana dan Prasarana Pariwisata.....	23
D. Pengembangan Pariwisata	23
E. Promosi Pariwisata.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	30
B. Fokus Penelitian	31
C. Lokasi dan Situs Penelitian	33
D. Sumber Data.....	33
E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Instrumen Penelitian.....	37
G. Analisis Data	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian	40
1. Gambaran Umum Kabupaten Blitar	40
2. Gambaran Umum Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar	45
3. Gambaran Umum Kawasan Wisata Penataran.....	78
B. Penyajian Data.....	80

1. Penyelenggaraan Peran Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar dalam upaya mengembangkan Kawasan Wisata Penataran.....	80
a. Perumusan kebijakan teknis.....	80
b. Penyelenggaraan urusan pelayanan umum.....	82
c. Pembinaan di bidang pariwisata.....	102
2. Faktor pendukung dan penghambat Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar dalam menyelenggarakan perannya mengembangkan Kawasan Wisata Penataran.....	106
C. Analisis Data Hasil Penelitian	111
1. Penyelenggaraan Peran Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar dalam upaya mengembangkan Kawasan Wisata Penataran.....	111
a. Perumusan kebijakan teknis.....	111
b. Penyelenggaraan urusan pelayanan umum.....	113
c. Pembinaan di bidang pariwisata.....	117
2. Faktor pendukung dan penghambat Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar dalam menyelenggarakan perannya mengembangkan Kawasan Wisata Penataran.....	120
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	125
B. Saran	127
DAFTAR PUSTAKA.....	130
LAMPIRAN	



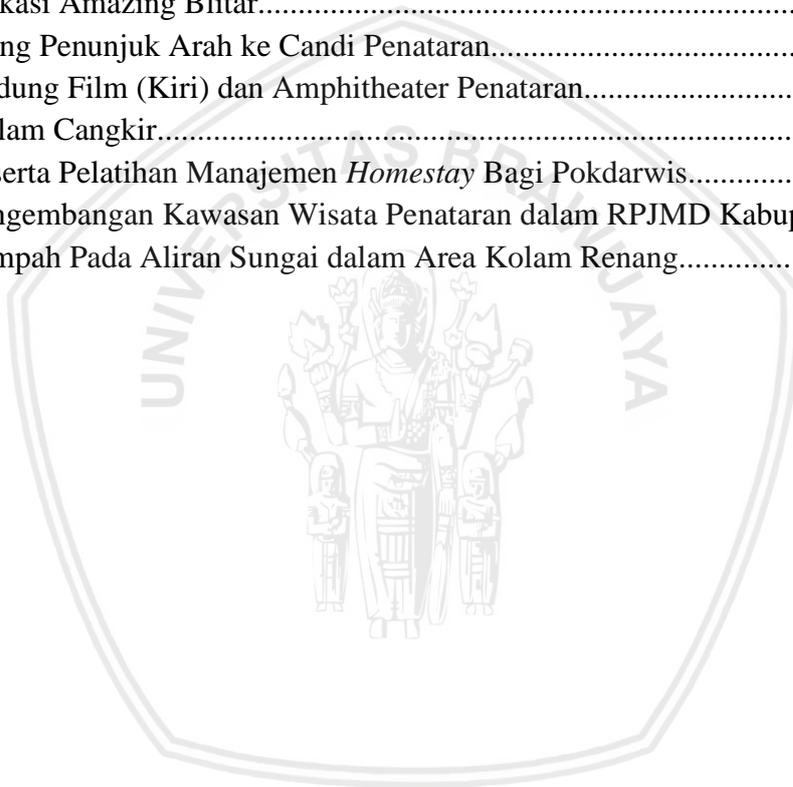
DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Blitar Tahun 2014.....	44
Tabel 4.2 Rencana Pembangunan Tahap III Kawasan Wisata Penataran	81
Tabel 4.3 Event di Kawasan Wisata Penataran Tahun 2018.....	88
Tabel 4.4 Petugas Tenaga Teknis Kawasan Wisata Penataran.....	101
Tabel 4.5 Kegiatan Pembinaan Pokdarwis dan Pegiat Wisata Kabupaten Blitar 2018.....	104



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Komponen Analisis Data Interaktif.....	39
Gambar 4.1 Peta Wilayah Kabupaten Blitar.....	42
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Disparbudpora Kabupaten Blitar.....	46
Gambar 4.3 Patung Koi.....	87
Gambar 4.4 Acara Purnama Seruling Penataran di Pelataran Candi Penataran 2018.....	89
Gambar 4.5 Kalender Wisata Kabupaten Blitar 2019.....	90
Gambar 4.6 Bentuk Promosi Melalui Instagram.....	91
Gambar 4.7 Bentuk Promosi Melalui Facebook.....	92
Gambar 4.8 Trotoar dan Pagar Pembatas Depan Kolam Renang Penataran.....	94
Gambar 4.9 Aplikasi Amazing Blitar.....	95
Gambar 4.10 Plang Penunjuk Arah ke Candi Penataran.....	96
Gambar 4.11 Gedung Film (Kiri) dan Amphitheater Penataran.....	98
Gambar 4.12 Kolam Cangkir.....	99
Gambar 4.13 Peserta Pelatihan Manajemen <i>Homestay</i> Bagi Pokdarwis.....	105
Gambar 4.14 Pengembangan Kawasan Wisata Penataran dalam RPJMD Kabupaten Blitar...107	
Gambar 4.15 Sampah Pada Aliran Sungai dalam Area Kolam Renang.....	109



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Candi Penataran.....	133
Lampiran 2 Halaman Museum Penataran.....	133
Lampiran 3 Tampak Depan Destinasi Kolam Renang Penataran.....	133
Lampiran 4 Salah Satu Wahana di Kolam Renang Penataran.....	134
Lampiran 5 Pujasera Kolam Renang Penataran.....	134
Lampiran 6 Tampilan Awal Aplikasi Amazing Blitar.....	135
Lampiran 7 Aplikasi Amazing Blitar.....	135
Lampiran 8 Bentuk Promosi Melalui Website.....	136
Lampiran 9 Pelatihan Pemandu Wisata 2018.....	136
Lampiran 10 Pamflet Pelatihan Marketing <i>Online</i>	136
Lampiran 11 Peneliti dan Kabid Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata.....	137
Lampiran 12 Bapak Masuri, Petugas BPCB di Candi Penataran.....	137
Lampiran 13 Kirab Tumpeng Agung Nusantara 2018.....	138
Lampiran 14 Pesona Bumi Penataran 2018.....	138
Lampiran 15 Festival Penataran Kuliner Internasional 2018.....	138



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wisata dianggap sebagai salah satu kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial karena dalam kegiatan wisata terdapat aktivitas yang dilakukan oleh wisatawan dengan berbagai alasan seperti untuk *refreshing*, belajar hingga bersosialisasi. Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Wisata diartikan sebagai kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Sedangkan Pariwisata didefinisikan sebagai suatu kegiatan perpindahan orang untuk sementara waktu ke destinasi diluar tempat tinggal dan tempat bekerjanya dan melaksanakan kegiatan selama di destinasi dan juga penyiapan-penyiapan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan mereka (Mathieson dan Wall dalam Pitana, 2005).

Pengertian dari pariwisata itu sendiri berdasarkan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata diartikan sebagai berbagai kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas dan layanan yang dapat disediakan oleh masyarakat, pengusaha maupun Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam sektor pariwisata di Indonesia berdasarkan pengertian tersebut bukan merupakan aktor tunggal dalam pemenuhan berbagai fasilitas pariwisata. Adanya pengertian pariwisata dalam Undang-

Undang yang mengatur tentang kepariwisataan tersebut tentu dapat menjadi salah satu acuan dalam memandang lebih dalam mengenai makna kepariwisataan di Indonesia.

Sektor pariwisata di Indonesia merupakan salah satu sektor yang memberikan pemasukan devisa cukup besar selain sektor migas. Tercatat pada tahun 2017 lalu sektor pariwisata Indonesia mendapatkan pemasukan sekitar 202,13 triliun rupiah, kemudian meningkat menjadi 220,5 triliun rupiah pada tahun 2018. Sedangkan untuk tahun 2019 pemerintah dan Bank Indonesia menargetkan pemasukan dari sektor pariwisata dapat meningkat menjadi 17,6 miliar dolar AS atau sekitar 246 triliun rupiah. Berdasarkan target tersebut, sejak tahun 2017 Kemenpar Indonesia mendorong tiap daerah untuk mengembangkan sektor pariwisatanya dan Kemenpar juga menetapkan tiga strategi utama dalam pengembangan pariwisata untuk mengupayakan tercapainya target tersebut. Tiga strategi tersebut adalah pengembangan pemasaran, pengembangan destinasi dan peningkatan sumber daya manusia (dilansir *kemenpar.go.id* pada 29 April 2019).

Salah satu daerah di Indonesia yang sedang gencar mengembangkan sektor pariwisata adalah Kabupaten Blitar. Berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar tahun 2016-2021, terdapat salah satu misi yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar yaitu :

“Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan usaha ekonomi masyarakat yang memiliki daya saing melalui peningkatan keterampilan dan keahlian, pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis Koperasi dan UMKM, ekonomi kreatif, jiwa kewirausahaan, potensi lokal daerah dan penguatan sektor pariwisata serta pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.”

Berdasarkan salah satu misi tersebut, dalam RPJMD Kabupaten Blitar terdapat salah satu sasaran yang ingin dicapai yaitu meningkatnya produktivitas usaha masyarakat, koperasi, UMKM berbasis pertanian dan pariwisata. Berkaitan dengan sasaran tersebut, terdapat salah satu strategi yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar untuk mencapainya, yaitu dengan mengembangkan destinasi pariwisata yang salah satu arah kebijakannya adalah pengembangan destinasi Kawasan Wisata Penataran.

Kawasan Wisata Penataran merupakan sebuah kawasan wisata yang terletak di Desa Penataran, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar. Berdasarkan penuturan pihak Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar, Kawasan Wisata Penataran ini terbagi menjadi dua zona, yaitu zona Candi Penataran dan zona Kolam Renang Penataran. Zona Candi Penataran terdiri dari destinasi Candi Penataran, sedangkan zona Kolam Renang Penataran terdiri dari destinasi kolam renang, *amphitheater*, Museum Penataran dan rencananya juga akan segera dioperasikan wahana baru yaitu gedung film yang akan digunakan untuk memutar film-film dokumenter berkaitan dengan Kabupaten Blitar dan berbagai potensinya. Selain itu di Kawasan Wisata Penataran (KWP) juga beberapa kali diadakan berbagai kegiatan atau pagelaran seni yang biasanya diadakan di pelataran Candi Penataran yang terdapat pada Kawasan Wisata Penataran tersebut. Pagelaran yang pernah dihelat diantaranya adalah Pesona Bumi Penataran, Purnama Seruling Penataran yang diselenggarakan oleh Dewan Kesenian Kabupaten Blitar dan Kirab Tumpeng Agung Nusantara yang

diselenggarakan oleh Lembaga Pelindung dan Pelestari Budaya Nusantara (LP2BN).

Salah satu pihak dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Blitar yang memiliki tanggung jawab dalam pengembangan Kawasan Wisata Penataran ini adalah Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar. Hal tersebut berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa penyelenggara pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas Kepala Daerah, DPRD dan Perangkat Daerah. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar dalam pengembangan Kawasan Wisata Penataran ini memiliki peran dalam hal pengadaan sarana dan prasarana serta pembinaan sumber daya manusia yang ada di sekitar Kawasan Wisata Penataran.

Pengembangan pariwisata itu sendiri menurut Musanef dalam Mustikawati (2017:4) diartikan sebagai suatu konsep kegiatan yang menyediakan segala macam bentuk kebutuhan serta fasilitas yang berhubungan dengan pariwisata. Cooper dalam Sunaryo (2013:159) menyatakan bahwa pengembangan destinasi pariwisata meliputi komponen-komponen utama yang meliputi *attraction*, *accessibility*, *amenities* dan *ancillary service*. Sedangkan Sedarmayanti (2016:28) berpendapat bahwa komponen pariwisata yang dapat juga disebut dengan produk/jasa wisata tersebut meliputi objek dan daya tarik wisata (atraksi), akomodasi, angkutan wisata, serta sarana dan prasarana wisata.

Berkaitan dengan Kawasan Wisata Penataran, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar memiliki tanggung jawab penuh terhadap

pengelolaan Kolam Renang Penataran, *amphitheater*, gedung film dan juga sarana prasarana Museum Penataran. Untuk Museum Penataran, pegawai operasionalnya semua berasal dan bagian dari tanggung jawab Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB). Sedangkan untuk Candi Penataran, berkaitan dengan sarana prasarana dan pengelolaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari BPCB Trowulan. Peran yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar dalam pengembangan Kawasan Wisata Penataran sampai saat ini mencakup perumusan kebijakan teknis yang dilakukan dengan merumuskan *master plan* pengembangan Kawasan Wisata Penataran, penyelenggaraan urusan pelayanan umum yang dilakukan melalui pemenuhan sarana dan prasarana Kawasan Wisata Penataran yang meliputi pengadaan gedung film 3D pada tahun 2017, kemudian pembangunan patung Koi, kolam anak yang berada di dalam destinasi Kolam Renang Penataran, serta pembangun trotoar dan pagar pembatas mulai dari patung Koi hingga Makam Syekh Subakir yang dilaksanakan tahun 2018 lalu.

Selain itu Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar dalam hal penyelenggaraan pelayanan umum juga menyelenggarakan peran yang mengupayakan promosi atau publikasi pariwisata bagi Kawasan Wisata Penataran, hal tersebut dilakukan dengan bermitra dengan berbagai pihak atau organisasi yang rutin melaksanakan *event* di Kawasan Wisata Penataran, teknisnya Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar memfasilitasi atau memberi layanan dalam hal publikasi atau promosi, misalnya melalui penyebaran informasi melalui kalender wisata. Disamping itu, juga terus

dilakukan penyebaran informasi pariwisata termasuk informasi *event* di Kawasan Wisata Penataran melalui berbagai media seperti melalui *website* resmi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar, aplikasi Amazing Blitar serta melalui sosial media seperti Facebook dan Instagram.

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar juga berperan sebagai pembina bagi masyarakat lokal, peran tersebut dilaksanakan dengan selalu mengikutsertakan kelompok sadar wisata Desa Penataran dalam berbagai pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar. Berbagai pelatihan tersebut meliputi pelatihan manajemen *homestay*, pelatihan marketing berbasis *online* dan pelatihan pemandu wisata. Secara umum Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar dalam menjalankan perannya untuk mengembangkan Kawasan Wisata Penataran juga berupaya memenuhi berbagai komponen pariwisata, hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Cooper dalam Sunaryo (2013:159) yang menyebutkan bahwa pengembangan destinasi pariwisata pada dasarnya berupa upaya pemenuhan komponen-komponen utama dalam pariwisata yang diantaranya meliputi *attraction*, *accessibility*, *amenities* dan *ancillary service*. Pada proses pemenuhan berbagai berbagai komponen pariwisata tersebut masih ditemukan berbagai permasalahan. Permasalahan yang ada diantaranya adalah masih banyak belum terpenuhinya fasilitas yang tersedia di Museum Penataran, misalnya adalah masih terbatasnya ruangan yang tersedia di museum tersebut, yang dianggap tidak seimbang dengan jumlah koleksi yang dipajang di museum tersebut, kemudian juga masih belum tersedianya ruang untuk terima

tamu di Museum Penataran hingga penambahan sumur, perbaikan paving dan taman Museum yang belum terlaksana.

Permasalahan yang lain adalah masih belum maksimalnya pengembangan yang dilakukan dengan mengacu pada komponen-komponen pariwisata yang harus dipenuhi, seperti masih belum adanya pembinaan yang secara khusus ditujukan untuk Pokdarwis Desa Penataran. Kemudian dalam aspek aksesibilitas hingga kini belum ada penunjuk arah ke Museum Penataran dan masih ditemukannya plang penunjuk arah yang sudah rusak. Program yang dirancang secara khusus untuk mempromosikan Kawasan Wisata Penataran pun hingga kini juga masih belum ada, serta masih kurangnya aspek amenities pariwisata yang terpenuhi, misalnya seperti pusat perbelanjaan/pusat *souvenir* hingga fasilitas akomodasi.

Selain itu juga terdapat beberapa faktor yang dianggap menghambat Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar dalam menyelenggarakan perannya dalam rangka pengembangan Kawasan Wisata Penataran. Beberapa hal yang menghambat tersebut adalah masih kurangnya sumber daya manusia dari kantor Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar yang dapat melakukan kontrol ke Kawasan Wisata Penataran, hingga masih sulit diaturnya sumber daya manusia pelaku wisata yang berada di Kawasan Wisata Penataran untuk menjaga kebersihan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, dapat diketahui bahwa peran dari Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar sangatlah penting dalam pengembangan Kawasan Wisata Penataran, maka dari itu peneliti

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penyelenggaraan Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Sektor Pariwisata (Studi tentang Penyelenggaraan Peran Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar dalam Pengembangan Kawasan Wisata Penataran)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penyelenggaraan peran Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar dalam pengembangan Kawasan Wisata Penataran?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar dalam menyelenggarakan perannya mengembangkan Kawasan Wisata Penataran?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelenggaraan peran Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar dalam pengembangan Kawasan Wisata Penataran.

2. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar dalam menyelenggarakan perannya mengembangkan Kawasan Wisata Penataran.

D. Kontribusi Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi positif yang meliputi :

1. Kontribusi Teoritis
 - a. Sebagai bahan kajian dalam menambah wacana pengembangan keilmuan administrasi publik.
 - b. Sebagai tambahan wacana untuk menganalisa peranan suatu organisasi publik.
2. Kontribusi Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu masukan atau sumber informasi bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian lebih lanjut seputar penyelenggaraan peran dari Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar
 - b. Diharapkan penelitian ini memberikan wawasan dan gambaran bagi berbagai kalangan mengenai penyelenggaraan peran dari Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar dalam upaya pengembangan pariwisata di Kabupaten Blitar.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian pendahuluan ini berisi tentang penjelasan secara garis besar mengenai latar belakang pengambilan judul yang berkaitan dengan penyelenggaraan peran Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar dalam pengembangan Kawasan Wisata Penataran. Selain itu, terdapat juga rumusan masalah yang penulis ambil berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, yang mana ini bertujuan agar penelitian lebih terfokus pada pokok bahasan tertentu. Pada bab ini pula disampaikan tujuan penelitian dan kontribusi yang diharapkan penulis atas hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini dipaparkan mengenai berbagai teori dan konsep yang menjadi landasan bagi peneliti dalam melakukan penelitian dan penganalisaan data yang diperoleh dalam penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai metode penelitian apa yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini. Metode penelitian ini terdiri dari : jenis penelitian, fokus penelitian, pemilihan lokasi dan situs penelitian beserta alasannya, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian dan analisis data yang

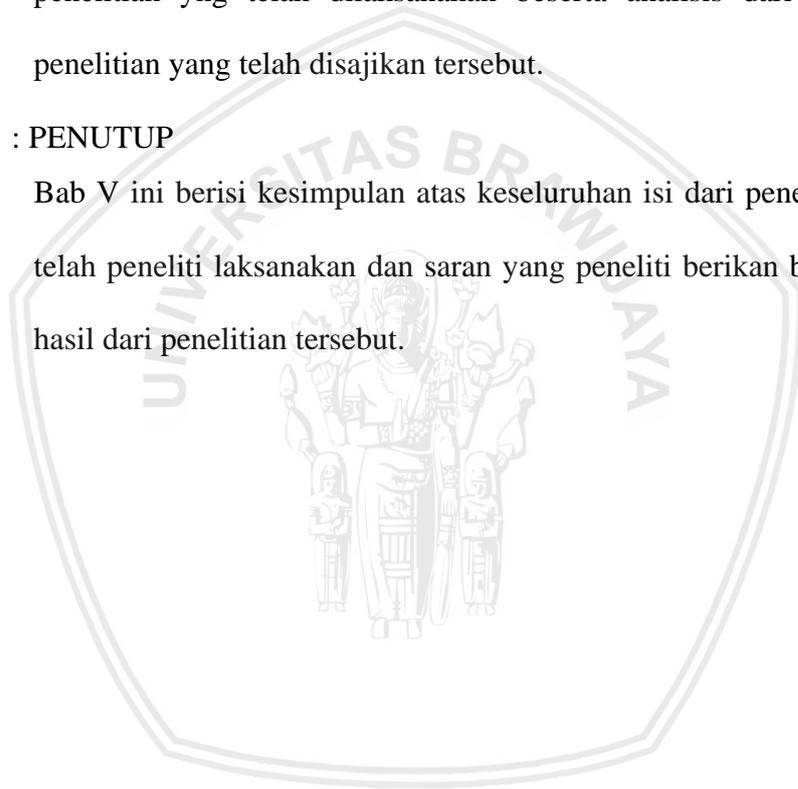
nantinya digunakan peneliti dalam pembahasan dari hasil penelitian yang didapatkan.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab IV ini berisi gambaran umum mengenai lokasi dan situs dari penelitian yang peneliti lakukan. Terdapat pula penyajian data hasil penelitian yang telah dilaksanakan beserta analisis dari data hasil penelitian yang telah disajikan tersebut.

BAB V : PENUTUP

Bab V ini berisi kesimpulan atas keseluruhan isi dari penelitian yang telah peneliti laksanakan dan saran yang peneliti berikan berdasarkan hasil dari penelitian tersebut.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Peran

Kata peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai suatu perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat, sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau pihak tertentu dalam suatu peristiwa. Rudy dalam Prasadja (2006:137-147) berpendapat bahwa peran dapat diartikan sebagai orientasi dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam posisi sosialnya. Sedangkan pengertian peran menurut Soekanto (2002:243), peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Lebih lanjut, peranan lebih banyak menunjukkan suatu fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses, jadi tepatnya adalah seseorang menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Menurut Levinson dalam Soekanto (2002:243), terdapat beberapa aspek dalam peran, aspek – aspek peran tersebut sebagai berikut :

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.

2. Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peran apabila dikaitkan dalam lingkup sektor publik tentu tidak jauh dari segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan atau urusan publik, seperti menurut Blakely dalam Kuncoro (2010:113-114), pemerintah (sektor publik) memiliki peran sebagai berikut :

1. Pemerintah sebagai koordinator

Sebagai koordinator, pemerintah dapat bertindak sebagai koordinator untuk menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi bagi pembangunan di daerahnya.

2. Pemerintah sebagai fasilitator

Sebagai fasilitator, pemerintah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan perilaku di daerahnya. Peran ini dapat meliputi pengefisienan proses pembangunan, perbaikan prosedur perencanaan dan penetapan peraturan.

3. Pemerintah sebagai stimulator

Sebagai stimulator, pemerintah pemerintah dapat menstimulasi penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang akan mempengaruhi perusahaan-perusahaan untuk masuk ke daerah tersebut dan menjaga agar perusahaan-perusahaan yang ada tetap di daerah tersebut.

Menurut Jones dalam Mahsun (2009:8-9), organisasi sektor publik memiliki peran sebagai berikut :

1. *Regulatory role*, organisasi sektor publik memiliki peran menetapkan segala aturan yang berkaitan dengan kepentingan umum.
2. *Enabling role*, merupakan peran organisasi publik dalam mengatur dan memperlancar aktivitas yang berkaitan dengan masyarakat secara aman, tertib dan lancar. Sebagai contoh, Dinas Ketertiban mengatur pedagang kaki lima agar tidak menghambat arus jalan, Dinas Pemadam Kebakaran menanggulangi adanya musibah kebakaran agar tidak merusak dan menimbulkan banyak kerugian.
3. *Direct provision of goods and service*, dalam hal ini peran sektor publik adalah ikut mengendalikan dan mengawasi sejumlah proses pengadaan barang dan atau jasa publik.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa peran merupakan sesuatu yang dimainkan atau dilakukan oleh pihak tertentu pada momentum atau peristiwa tertentu, yang mana peran tersebut dapat meliputi dalam hal hak maupun kewajiban yang dijalankan oleh pihak terkait dalam suatu status, posisi dan jabatan yang diembannya. Tiap pihak yang menjalankan perannya memiliki porsi tanggung jawab atas apa yang diperankannya, yang mana dampak dari peran yang dilakukan dapat berupa hal yang positif maupun negatif bagi lingkungan sekitarnya.

B. Pemerintah Daerah

1. Pengertian Pemerintah Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Penyelenggara pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdiri atas :

a. Kepala Daerah

Kepala Daerah adalah pemimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah otonom.

b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

c. Perangkat Daerah

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dari daerah.

2. Kewenangan dan Fungsi Pemerintah Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah melaksanakan peran desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah berfungsi untuk menjalankan urusan pemerintah konkuren, berbeda dengan pemerintah pusat yang melaksanakan urusan pemerintahan absolut. Urusan pemerintahan konkuren dibagi antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Pembagian urusan tersebut didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional, urusan pemerintahan tersebutlah yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Urusan pemerintahan konkuren terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terbagi lagi menjadi urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat, kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta berbagai urusan sosial. Dalam hal urusan wajib juga terdapat yang disebut dengan urusan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar, yang terdiri dari hal - hal sebagai berikut :

- a. Tenaga kerja

- b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- c. Pangan
- d. Pertanahan
- e. Lingkungan hidup
- f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- g. Pemberdayaan masyarakat dan desa
- h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- i. Perhubungan
- j. Komunikasi dan informatika
- k. Koperasi, usaha kecil dan menengah
- l. Penanaman modal
- m. Kepemudaan dan olah raga
- n. Statistik
- o. Persandian
- p. Kebudayaan
- q. Perpustakaan
- r. Kearsipan

Disamping urusan wajib, pemerintah daerah juga memiliki wewenang dalam hal urusan pilihan yang mana urusan pilihan ini tidak selalu dimiliki oleh setiap daerah, tergantung oleh letak geografis dan potensi yang dimiliki oleh daerah masing – masing, yang termasuk kedalam urusan pilihan adalah sebagai berikut :

- a. Kelautan dan perikanan
- b. Pariwisata

- c. Pertanian
- d. Kehutanan
- e. Energi dan sumber daya mineral
- f. Perdagangan
- g. Perindustrian
- h. Transmigrasi

Rasyid dalam Labolo (2006:34) membagi fungsi pemerintahan menjadi empat bagian, yaitu pelayanan (*public service*), pembangunan (*development*), pemberdayaan (*empowering*), dan pengaturan (*regulation*). Sedangkan menurut Ndraha (2000: 78-79) pemerintah memiliki dua fungsi dasar, yaitu fungsi primer (fungsi pelayanan) dan fungsi sekunder (fungsi pemberdayaan). Fungsi primer yaitu fungsi pemerintahan sebagai *provider* jasa-jasa publik yang tidak dapat diprivatisasikan termasuk jasa hankam, layanan sipil, dan layanan birokrat, fungsi primer secara terus menerus berjalan dan berhubungan positif dengan keberdayaan yang diperintah artinya semakin berdaya masyarakat, maka semakin meningkat pula fungsi primer pemerintahan. Sedangkan fungsi sekunder adalah sebagai *provider* kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan barang dan jasa yang mereka tidak mampu penuhi sendiri karena masih lemah dan tak berdaya (*powerless*) termasuk penyediaan pembangunan sarana dan prasarana. fungsi sekunder biasanya berhubungan negatif dengan tingkat keberdayaan yang di perintah, artinya semakin berdaya masyarakat semakin berkurang fungsi sekunder pemerintah dari *rowing* (pengaturan) ke *steering* (pengendalian).

C. Konsep Pariwisata

1. Pengertian Pariwisata

Pariwisata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan perjalanan untuk rekreasi. Menurut Utama (2014:20) Pariwisata berasal dari dua kata bahasa Sansekerta yaitu *pari* dan *wisata*. *Pari* berarti semua, seluruh atau penuh, sedangkan *wisata* berarti perjalanan. Menurut Ismayanti (2010:1) Pariwisata adalah kegiatan dinamis yang melibatkan banyak manusia serta menghidupkan berbagai usaha. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah, sedang wisata itu sendiri masih dalam Undang-undang yang sama didefinisikan sebagai suatu perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari daya tarik wisata yang dikunjunginya dalam jangka waktu sementara.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pengertian atau definisi dari pariwisata pada intinya adalah suatu kegiatan dalam bentuk perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk keperluan rekreasi, pengembangan atau pembelajaran pribadi serta juga bisa jadi untuk mempelajari daya tarik wisata pada daerah yang dikunjunginya.

2. Jenis Pariwisata

Spillane (1987:29-31) membagi pariwisata menjadi beberapa jenis berdasarkan motif dan tujuannya, yaitu sebagai berikut :

a. Pariwisata untuk menikmati perjalanan (*Pleasure Tourism*)

Jenis pariwisata ini dilakukan oleh orang-orang yang meninggalkan tempat tinggalnya untuk berlibur, mencari udara segar, memenuhi kehendak ingintahunya, mengendorkan ketegangan syaraf, melihat sesuatu yang baru, menikmati keindahan alam, mengetahui hikayat rakyat setempat, mendapatkan ketenangan.

b. Pariwisata untuk rekreasi (*Recreation Tourism*)

Pariwisata ini dilakukan untuk pemanfaatan hari-hari libur untuk beristirahat, memulihkan kembali kesegaran jasmani dan rohaninya, dan menyegarkan diri dari keletihan dan kelelahannya. Dapat dilakukan pada tempat yang menjamin tujuan-tujuan rekreasi yang menawarkan kenikmatan yang diperlukan seperti tepi pantai, pegunungan, pusat-pusat peristirahatan dan pusat-pusat kesehatan.

c. Pariwisata untuk kebudayaan (*Cultural Tourism*)

Jenis ini ditandai oleh adanya rangkaian motivasi, seperti keinginan untuk belajar di pusat-pusat pengajaran dan riset, mempelajari adat-istiadat, kelembagaan, dan cara hidup masyarakat yang berbeda-beda, mengunjungi monumen bersejarah, peninggalan masa lalu, pusat-pusat kesenian dan keagamaan, festival seni musik, teater, tarian rakyat dan lain-lain.

d. Pariwisata untuk olahraga (*Sports Tourism*)

Pariwisata ini dapat dibagi lagi menjadi dua kategori:

- 1) *Big sports events*, yaitu peristiwa-peristiwa olahraga besar seperti *Olympiade Games*, kejuaraan ski dunia, kejuaraan tinju dunia, dan lain-lain yang menarik perhatian bagi penonton atau penggemarnya.
- 2) *Sporting tourism of the Practitioners*, yaitu pariwisata olahraga bagi mereka yang ingin berlatih dan mempraktekkan sendiri seperti pendakian gunung, olahraga naik kuda, berburu, memancing dan lain-lain.

e. Pariwisata untuk urusan usaha dagang (*Business Tourism*)

Menurut para ahli teori, perjalanan pariwisata ini adalah bentuk profesional travel atau perjalanan karena ada kaitannya dengan pekerjaan atau jabatan yang tidak memberikan kepada seseorang untuk memilih tujuan maupun waktu perjalanan.

f. Pariwisata untuk berkonvensi (*Convention Tourism*)

Pariwisata ini banyak diminati oleh negara-negara karena ketika diadakan suatu konvensi atau pertemuan maka akan banyak peserta yang hadir untuk tinggal dalam jangka waktu tertentu dinegara yang mengadakan konvensi. Negara yang sering mengadakan konvensi akan mendirikan bangunan-bangunan yang menunjang diadakannya pariwisata konvensi.

Ismayanti (2010:150-155) membagi wisata berdasarkan daya tariknya menjadi tiga jenis yang terdiri dari :

a. Pariwisata Alam

Pariwisata alam merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan wisata alam. Pariwisata alam muncul karena adanya daya tarik alam, yang dimaksud dengan daya tarik alam adalah berupa alam yang terbentuk dari hasil ciptaan Tuhan seperti pantau, gunung, perairan, tata lingkungan alami seperti danau hingga tata lingkungan hasil budidaya manusia seperti pekebunan dan peternakan.

b. Pariwisata Budaya

Pariwisata budaya adalah pariwisata yang berdasarkan pada mosaik tempat, tradisi, kesenian, upacara - upacara adat dan pengalaman yang memotret suatu bangsa atau suku bangsa dengan masyarakat yang merefleksikan keanekaragaman dan identitas (karakter) dari suatu masyarakat atau bangsa yang bersangkutan. Pariwisata budaya ini menjadikan potensi budaya sebagai potensi dalam destinasi wisatanya.

c. Pariwisata Minat Khusus

Pariwisata minat khusus adalah pariwisata yang menawarkan kegunaan yang tidak biasa dilakukan oleh wisatawan pada umumnya, atau dalam kata lain merupakan wisata yang membutuhkan keahlian atau ketertarikan khusus. Misalnya seperti wisata paralayang, arung jeram hingga eksplorasi gua.

3. Sarana dan Prasarana Pariwisata

Suwantoro dalam Nawangsari (2018:36) mendefinisikan sarana pariwisata sebagai suatu kelengkapan dari destinasi atau daerah tujuan wisata yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dari wisatawan yang beragam dalam rangka menikmati perjalanan wisatanya. Ghani dalam Ghani (2017:24) mengartikan sarana pariwisata sebagai segala sesuatu yang melengkapi objek wisata dan bertujuan untuk memudahkan proses berwisata para wisatawan agar berjalan lancar. Contoh dari sarana pariwisata ini diantaranya adalah *travel agent*, angkutan wisata, atraksi wisata, tempat olahraga, pusat *souvenir* hingga penyedia makanan.

Sedangkan prasarana pariwisata adalah berbagai fasilitas yang dapat memungkinkan berbagai sarana pariwisata dapat tetap hidup atau berfungsi sebagaimana fungsinya dalam rangka untuk memberikan pelayanan kepada wisatawan (Prasetyo, 2016). Suwantoro dalam Ghani (2017:25) berpendapat bahwa prasarana pariwisata merupakan sumber daya alam dan sumber daya buatan manusia yang secara mendasar dibutuhkan oleh wisatawan untuk perjalanan wisatanya di daerah tujuan wisata. Prasarana pariwisata ini meliputi akses jalan, air, listrik, alat telekomunikasi, dll.

D. Pengembangan Pariwisata

Pengembangan sektor pariwisata pada dasarnya perlu untuk dilakukan agar potensi pariwisata yang ada tidak hanya sebatas menjadi potensi belaka, namun juga dapat memberi kemanfaatan bagi masyarakat. Menurut Mustikawati (2017:2), pengembangan sektor pariwisata memiliki peran penting dalam

peningkatan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan menurut Hasan (2016:16) maksud dari pengembangan pariwisata pada intinya adalah suatu upaya yang ditujukan untuk mengembangkan atau memajukan objek wisata agar objek wisata tersebut lebih baik dan lebih menarik ditinjau dari segi tempat maupun benda-benda yang ada di dalamnya agar dapat menarik minat wisatawan untuk mengunjunginya.

Berkaitan dengan pengembangan pariwisata di Indonesia, Nugroho (2015:214) berpendapat bahwa pengembangan pariwisata di Indonesia memiliki perspektif yang sangat luas. Ia tidak hanya merupakan implementasi dari konsep pembangunan nasional dan wilayah, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk lokal, pengembangan dan pengkayaan ragam budaya bangsa. Kegiatan pengembangan pariwisata menurut Soekadijo dalam Rahman (2010:11) ditujukan untuk :

1. Meningkatkan urbanisasi karena pertumbuhan, perkembangan serta perbaikan fasilitas pariwisata.
2. Mengubah industri-industri baru yang berkaitan dengan jasa-jasa wisata. Misalnya, usaha transportasi, akomodasi (hotel, motel, pondok wisata, perkemahan, dan lain-lain) yang memerlukan perluasan beberapa industri kecil seperti kerajinan tangan.
3. Memperluas pasar barang-barang lokal.
4. Memberi dampak positif pada tenaga kerja, karena pariwisata dapat memperluas lapangan kerja baru (tugas baru di hotel atau tempat penginapan, usaha perjalanan, industri kerajinan tangan dan cendera mata, serta tempattempat penjualan lainnya).

Sedangkan menurut Marpaung dalam Rahman (2010:12) berpendapat bahwa pengembangan kepariwisataan ditujukan untuk memberikan keuntungan baik bagi wisatawan maupun warga setempat. Pariwisata dapat memberikan kehidupan yang standar kepada warga setempat melalui keuntungan ekonomi yang didapat

dari tempat tujuan wisata. Menurut Cooper dalam Sunaryo (2013:159) pengembangan destinasi pariwisata harus meliputi pemenuhan komponen-komponen utama pariwisata. Cooper dalam Pitana (2012) yang dikutip oleh Wanda(2018:85), menyebutkan bahwa aspek utama destinasi wisata meliputi *attraction, accessibility, amenities* dan *ancillary service*(4A). Berikut penjelasan mengenai komponen-komponen tersebut :

1. *Attraction* (Atraksi)

Atraksi atau daya tarik wisata menurut Suwena dalam Khotimah (2017:59) merupakan komponen yang signifikan dalam menarik kedatangan wisatawan, yang termasuk dalam atraksi ini diantaranya adalah *natural resources* (alami) seperti gunung, danau, pantai dan bukit. Kemudian ada atraksi wisata budaya atau buatan seperti situs arkeologi, seni pertunjukan, ritual, festival, pameran, kehidupan masyarakat sehari-hari, keramah tamahan, makanan dan sebagainya.

2. *Accessibility* (Aksesibilitas)

Menurut Sunaryo (2013:173), aksesibilitas pariwisata dimaksudkan sebagai segenap sarana yang memberikan kemudahan kepada wisatawan untuk mencapai suatu destinasi maupun tujuan wisata terkait. Menurut French dalam Sunaryo (2013:173) faktor-faktor yang penting dan terkait dengan aspek aksesibilitas wisata meliputi petunjuk arah, bandara, terminal, waktu yang dibutuhkan, biaya perjalanan, frekuensi transportasi menuju lokasi wisata dan perangkat lainnya.

3. *Amenities* (Amenitas)

Sugiama dalam Khotimah (2017:59) menjelaskan bahwa amenitas meliputi berbagai fasilitas untuk memenuhi kebutuhan akomodasi (tempat penginapan),

penyediaan makanan dan minuman, tempat hiburan (*entertainment*), tempat olahraga, tempat-tempat perbelanjaan (*retailing*) bagi wisatawan. French dalam Sunaryo (2013:173) memberikan batasan bahwa amenitas bukan merupakan daya tarik bagi wisatawan, namun dengan kurangnya amenitas akan menjadikan wisatawan menghindari destinasi tertentu.

4. *Ancillary Service* (Layanan Tambahan)

Suranny (2017:48) mendefinisikan *ancillary service* sebagai ketersediaan orang-orang maupun kelompok yang mengatur dan mengurus suatu destinasi wisata, karena apabila tanpa ada yang mengurus maka suatu destinasi wisata dapat menjadi terbengkalai. Sedangkan Sugiyama dalam Khotimah (2017:59) menjelaskan bahwa *ancillary service* mencakup keberadaan berbagai organisasi atau kelompok tertentu untuk mendorong pengembangan serta pemasaran kepariwisataan destinasi bersangkutan.

Sedangkan komponen pariwisata atau produk wisata yang perlu disediakan dan merupakan bagian dari keperluan wisatawan menurut Sedarmayanti (2016:28) adalah meliputi objek dan daya tarik wisata (atraksi), akomodasi, angkutan wisata, sarana dan prasarana wisata. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat diketahui bahwa pada dasarnya pengembangan pariwisata merupakan upaya yang dilakukan untuk memanfaatkan dan meningkatkan kualitas penggunaan berbagai potensi dalam sektor pariwisata agar dapat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

E. Promosi Pariwisata

Promosi secara umum menurut Putri (2014:47) adalah sebuah upaya dari pemasar atau promotor dalam menginformasikan dan mempengaruhi orang atau pihak lain agar tertarik terhadap apa yang dipromosikannya. Sedangkan Manafe, dkk.(2016:105) berpendapat bahwa promosi pada prinsipnya adalah memperkenalkan atau menginformasikan kepada pihak konsumen atau target promosi tentang keberadaan suatu produk dengan harapan konsumen atau target promosi dapat terbujuk dan tertarik terhadap produk tersebut. Mahyar dalam Rahman (2010:16) menyatakan bahwa tujuan dari dilakukannya promosi adalah :

- a. Untuk memperkenalkan perusahaan atau pihak promotor kepada pihak luar.
- b. Untuk meningkatkan penjualan
- c. Sebagai sarana untuk memberitahukan kepada pihak luar tentang kehebatan atau keunggulan dari perusahaan dan produk dari perusahaan tersebut.
- d. Ingin mengetengahkan segi kelebihan perusahaan atau produk atau jasa terhadap saingan.

Kegiatan promosi apabila dikaitkan dalam konteks kepariwisataan maka yang menjadi objek dari aktivitas promosi tersebut adalah objek atau destinasi pariwisata, yang mana aktivitas atau kegiatan promosi tersebut dapat dilakukan dengan cara memaparkan kondisi daya tarik dari objek wisata yang dipromosikan, serta sarana dan prasarana yang telah tersedia di dalamnya, sehingga dapat menimbulkan keinginan pihak atau orang lain untuk berkunjung ke objek

pariwisata tersebut (Rahman, 2010). Sedangkan menurut Sunaryo (2013:177) promosi pariwisata (*tourism promotion*) adalah suatu cara atau teknik yang digunakan untuk menawarkan suatu produk atau destinasi pariwisata dengan menginformasikan kepada para calon wisatawan, yang mana tindakan menginformasikan tersebut dapat dilakukan dengan memberitahukan tempat-tempat dimana wisatawan dapat melakukan kegiatan wisata ataupun pembelian produk wisata dengan waktu dan tempat tertentu.

Gromang dalam Novalina (2008:14), menyatakan bahwa promosi pariwisata meliputi berbagai kegiatan yang direncanakan sebelumnya yang mana dalam aktivitasnya dapat berupa penyebaran informasi pariwisata seperti melalui iklan, film, brosur, buku panduan, poster, dll. Setiadi dalam Herat (2015) menjabarkan tujuan diadakannya kegiatan promosi pariwisata adalah sebagai berikut :

1. Untuk Menginformasikan (*To Inform*)

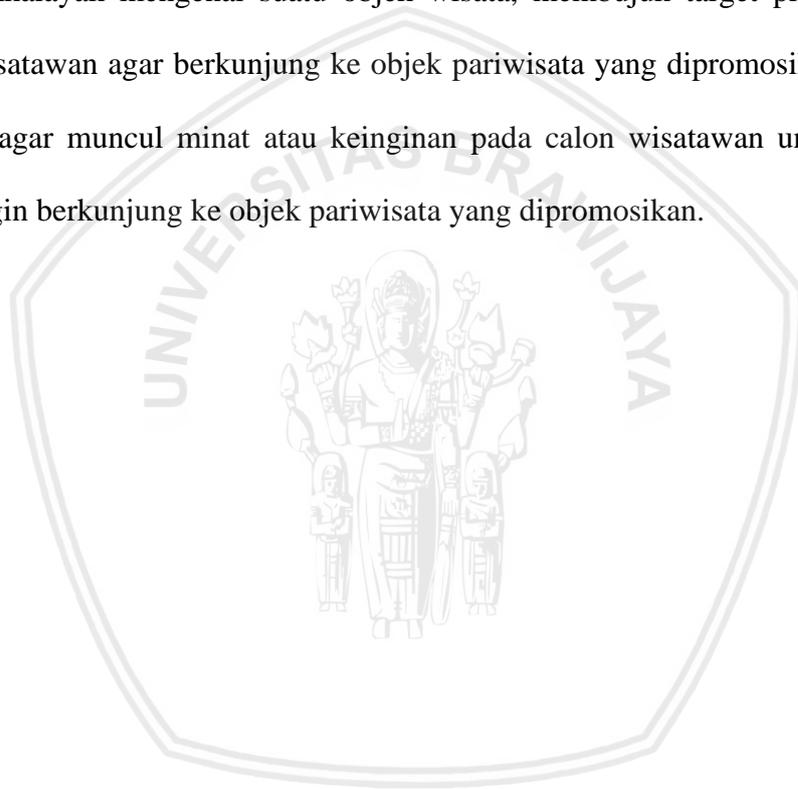
Kegiatan promosi pariwisata dilakukan untuk menginformasikan kepada publik mengenai berbagai potensi pariwisata yang ada dalam rangka memperkenalkan potensi dari objek wisata yang ada beserta berbagai aspek yang ada di dalamnya.

2. Untuk Mempengaruhi (*To Persuade*)

Kegiatan promosi pariwisata dijalankan untuk mempengaruhi terbentuknya minat dan keinginan publik berkaitan dengan objek atau potensi pariwisata yang dipromosikan. Kegiatan ini tidak cukup hanya untuk mempengaruhi khalayak agar muncul minat dan keinginan untuk mengenal lebih dekat tentang potensi atau objek pariwisata yang ada,

namun juga dapat mempengaruhi adanya minat dan keinginan mereka agar berkunjung ke objek wisata yang dipromosikan.

Berdasarkan berbagai pengertian dari promosi pariwisata tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya kegiatan promosi pariwisata (*tourism promotion*) merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menginformasikan kepada khalayak mengenai suatu objek wisata, membujuk target promosi atau calon wisatawan agar berkunjung ke objek pariwisata yang dipromosikan dengan harapan agar muncul minat atau keinginan pada calon wisatawan untuk benar-benar ingin berkunjung ke objek pariwisata yang dipromosikan.





BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif pada dasarnya merupakan suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki fenomena sosial dan masalah-masalah yang berhubungan dengan manusia. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2017:4) bahwa metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Lebih lanjut Moleong (2017:6) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan sebagainya secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah serta dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Penggunaan penelitian dengan pendekatan kualitatif salah satunya digunakan untuk memahami interaksi sosial. Interaksi sosial yang terjadi dapat diuraikan secara gamblang salah satunya apabila peneliti melakukan penelitian dengan pendekatan kualitatif, yang mana dalam proses penelitiannya dilakukan secara mendalam dengan melakukan wawancara pada subjek-subjek terkait disertai dengan dokumentasi data - data yang diperlukan. Berdasarkan penjelasan yang

telah dipaparkan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa peneliti menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini untuk memperoleh hasil mengenai penjelasan dan penjabaran tentang penyelenggaraan peran Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar dalam upaya pengembangan Kawasan Wisata Penataran.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian bermanfaat bagi pembatasan mengenai objek penelitian yang diangkat. Penentuan fokus penelitian lebih diarahkan pada tingkat kebaruan informasi yang diperoleh dari situasi perekonomian dan sosial, ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan data yang tidak relevan. Fokus penelitian merupakan masalah pokok yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperoleh peneliti dari kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan yang lainnya (Moleong, 2017:97). Spradley dalam Faisal (1988) yang dikutip oleh Sugiyono (2013:209), menyebutkan bahwa terdapat empat cara untuk menentukan fokus penelitian, yaitu :

1. Menentukan fokus berdasarkan pada saran dari informan
2. Menentukan fokus berdasarkan domain-domain tertentu
3. Menetapkan fokus yang memiliki nilai temuan untuk pengembangan IPTEK
4. Menetapkan fokus berdasarkan permasalahan yang terkait dengan teori-teori yang telah ada

Berangkat dari pendapat Spradley tersebut, maka peneliti menentukan fokus

penelitian ini berlandaskan pada domain dari peran Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar yang dapat dilihat berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan yang terdapat dalam Peraturan Bupati Blitar No. 64 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar. Hal ini juga sesuai dengan pengertian peran menurut Soekanto (2002:243), yang menyatakan bahwa peran merupakan aspek dinamis kedudukan, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran. Adapun fokus penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan peran Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar dalam pengembangan Kawasan Wisata Penataran, meliputi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olahraga
 - b. Penyelenggaraan urusan pelayanan umum bidang pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olahraga
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olahraga
2. Faktor pendukung dan penghambat Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar dalam menyelenggarakan perannya mengembangkan Kawasan Wisata Penataran.

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terhadap suatu objek untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat di dalam penelitian. Lokasi dari penelitian ini adalah Kabupaten Blitar. Alasan dari peneliti memilih Kabupaten Blitar sebagai lokasi penelitian adalah karena Kabupaten Blitar merupakan salah satu daerah yang sedang gencar melakukan pembangunan pada sektor pariwisata.

Sedangkan yang dimaksud dengan situs penelitian adalah tempat dimana peneliti menangkap keadaan yang sebenarnya berkaitan dengan permasalahan yang peneliti angkat di dalam penelitian. Situs penelitian ini dipilih agar lokus penelitian tidak meluas sehingga melenceng dari fokus penelitian yang telah ditentukan. Adapun situs dari penelitian ini adalah Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar dan Kawasan Wisata Penataran. Pemilihan situs penelitian ini didasarkan pada tugas dan fungsi dari dinas tersebut yang berkaitan dengan pengembangan Kawasan Wisata Penataran dan Kawasan Wisata Penataran sendiri sebagai objek dari pengembangan pariwisata di Kabupaten Blitar.

D. Sumber Data

Menurut Lofland dalam Moleong (2017:157), sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan yang dapat peneliti dapatkan dari informan melalui wawancara, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Data yang dikumpulkan dari penelitian ini berasal dari dua sumber, yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung oleh peneliti berdasarkan sumber yang terdapat di lapangan. Data primer dapat berupa opini informan baik itu individu maupun kelompok, hasil observasi maupun penelitian yang dilakukan secara empirik. Untuk mendapatkan data - data yang empirik, peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa informan yang peneliti anggap mampu memberikan informasi – informasi yang diperlukan sesuai dengan fokus penelitian ini.

Pada penelitian ini data primer yang peneliti dapatkan bersumber dari wawancara yang dilakukan terhadap informan sebagai berikut :

- a. Bapak Arinal Huda, Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar.
- b. Bapak Wahyudi, koordinator tenaga teknis Kawasan Wisata Penataran dan Bapak Agus penjaga/petugas kebersihan *amphitheater*.
- c. Ibu Sri Suyanti, Bapak Agus Setiono dan Bapak Masuri. pegawai Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) yang bertugas di Museum Penataran dan Candi Penataran.
- d. Ibu Binti Fatimah, pengurus Pokdarwis “Majapahit” Desa Penataran

2. Data Sekunder

Data sekunder (*secondary data*) menurut Sugiyono (2013:308) merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung atau melalui media perantara. Data sekunder tersebut dalam penelitian dapat berupa dokumen-

dokumen, foto, artikel, jurnal, penelitian terdahulu hingga kutipan dari situs tertentu di internet. Data sekunder yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata
- c. Peraturan Bupati Blitar No. 64 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar
- d. RPJMD Kabupaten Blitar 2016 - 2021
- e. Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar 2017 – 2021
- f. Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar Tahun 2018
- g. Rekap *Event* Terlaksana di Kawasan Wisata Penataran Tahun 2018
- h. Data Petugas Teknis Kawasan Wisata Penataran
- i. *Master plan* Pengembangan Kawasan Wisata Penataran
- j. Dokumentasi yang diambil oleh peneliti

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2013:224), bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi, wawancara, angket dan dokumentasi. Namun dalam penelitian ini teknik pengumpulan data

yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan melalui tiga metode, yaitu :

1. Wawancara

Esterberg dalam Sugiyono (2013:231), mendefinisikan wawancara sebagai pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tersebut. Dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang informan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi. Dalam melakukan wawancara, peneliti menggunakan alat bantu seperti buku untuk mencatat beberapa poin penting dalam proses wawancara yang didapatkan dari informan dan *handphone* yang digunakan untuk merekam suara saat proses wawancara. Wawancara ini peneliti lakukan untuk mendapatkan pemaparan yang rinci dari informan berkaitan dengan fokus penelitian, sedangkan teknik wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara semi terstruktur.

2. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan suatu obyek yang sistematis mengenai kejadian yang diteliti. Pelaksanaan dari observasi yang peneliti lakukan kadangkala dilakukan dengan menyatakan diri bahwa sedang meneliti, namun kadangkala melaksanakan observasi secara tidak terus terang (Sugiyono, 2013:227-228). Secara mendasar, teknik pengumpulan data melalui observasi merupakan kegiatan yang dilakukan berdasarkan pengamatan empiris atau menggunakan panca indera untuk mendapatkan data yang dibutuhkan sesuai dengan fokus penelitian.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2013), dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang. Pengumpulan data melalui dokumen ini peneliti lakukan untuk menunjang data – data yang peneliti dapatkan dari proses wawancara dan observasi serta untuk memperkuat keakuratan data yang peneliti peroleh dari proses wawancara dan observasi.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk pengumpulan data dalam sebuah penelitian. Menurut Sugiyono (2013:222), instrumen penelitian merupakan alat ukur untuk mendapatkan data penelitian. Instrumen penelitian pada penelitian dengan pendekatan kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan dan penalaran dari peneliti itu sendiri. Dengan demikian yang dimaksud dengan instrumen penelitian dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif ini adalah peneliti sendiri dengan ditunjang pedoman wawancara dan beberapa peralatan penunjang lainnya. Instrumen dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Peneliti. Menurut Moleong (2017) salah satu ciri dari penelitian kualitatif adalah memasukkan manusia atau peneliti sendiri sebagai alat pengumpul data utama. Peneliti dalam pengambilan data di lapangan dilakukan dengan mengamati fenomena-fenomena yang terjadi melalui observasi serta diperkuat dan diperjelas dengan wawancara terhadap informan.

2. Pedoman wawancara. Pedoman wawancara yaitu berupa materi poin-poin yang menjadi dasar dan acuan dalam melakukan wawancara dengan informan. Pedoman wawancara ini dibuat berdasarkan fokus penelitian, hal ini dimaksudkan agar apa saja yang ditanyakan kepada informan tidak keluar dari fokus penelitian sehingga data yang didapatkan dari wawancara sesuai dengan data yang diperlukan.
3. Alat penunjang lainnya yang terdiri dari buku catatan saku yang digunakan untuk mencatat beberapa poin penting yang ditemukan selama proses penelitian, selain itu juga digunakan *handphone* untuk merekam suara saat proses wawancara dan juga digunakan untuk mengambil gambar yang diperlukan untuk menunjang data penelitian.

G. Analisis Data

Analisis data merupakan bagian dari proses memahami sejumlah data penelitian yang telah diperoleh, maka perlu dilakukan pengolahan terhadap data-data yang telah didapat. Bogdan dalam Sugiyono (2013:244) menyatakan bahwa :

“Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.”

Adapun model analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah model analisis data interaktif menurut Miles, Huberman dan Saldana dalam Sugiyono (2013:246-252). Berikut tahapan – tahapan model analisis tersebut :

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

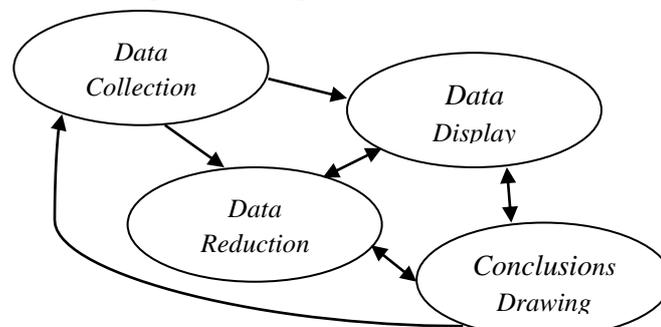
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting serta dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran dengan lebih jelas.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data merupakan tahap setelah data direduksi, dalam penelitian kualitatif data bisa disajikan dalam bentuk tabel, grafik, pictogram dan sejenisnya. Penyajian data juga dapat dilakukan dengan cara mendeskripsikan hasil wawancara yang dituangkan dalam bentuk uraian dengan teks naratif, dan didukung oleh dokumen-dokumen yang diperlukan untuk diadakanya suatu kesimpulan. Maka data akan lebih terorganisir, tersusun dalam pola hubungan dan lebih mudah untuk dipahami.

3. *Conclusions Drawing* (Penarikan Kesimpulan)

Pada tahap ini dilakukan penarikan kesimpulan dari data-data yang telah direduksi dan disajikan. Penarikan kesimpulan diambil berdasarkan pada fokus penelitian.



Gambar 3.1 Komponen Analisis Data Interaktif

Sumber : Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2013:247)

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Blitar

a. Visi dan Misi

1) Visi

Untuk melaksanakan wewenang dan tanggungjawabnya, maka guna menjawab tantangan masa depan dan tuntutan kerja secara internal, dirumuskan Visi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar sebagai berikut :

**“KABUPATEN BLITAR LEBIH SEJAHTERA, MAJU
DAN BERDAYA SAING”**

2) Misi

- a) Meningkatkan taraf kehidupan masyarakat melalui akselerasi program pengentasan kemiskinan, optimalisasi dan pengembangan program pembangunan dan kemasyarakatan yang tepat sasaran;
- b) Memantapkan kehidupan masyarakat berlandaskan nilai-nilai keagamaan (religius), kearifan lokal dan hukum melalui optimalisasi kehidupan beragama dan kehidupan sosial, serta penerapan peraturan perundang-undangan;

- c) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) masyarakat melalui peningkatan mutu bidang pendidikan (termasuk di dalamnya adalah wawasan kebangsaan, budi pekerti, praktek keagamaan) dan kesehatan serta kemudahan akses memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan yang memadai;
- d) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi, serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi;
- e) Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan usaha ekonomi masyarakat yang memiliki daya saing melalui peningkatan keterampilan dan keahlian, pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis Koperasi dan UMKM, ekonomi kreatif, jiwa kewirausahaan, potensi lokal daerah dan penguatan sektor pariwisata serta pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup;
- f) Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan pedesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa.

b. Letak Geografis

Kabupaten Blitar merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur yang secara geografis Kabupaten Blitar terletak pada 111 25' – 112 20' BT dan 7 57-89'51 LS. Kabupaten Blitar berada di sebelah barat daya Ibu Kota Provinsi Jawa

utara dan Kabupaten Blitar bagian selatan yang sekaligus membedakan potensi kedua wilayah tersebut yang mana Kabupaten Blitar utara merupakan dataran rendah seperti lahan sawah dan beriklim basah sedangkan Kabupaten Blitar selatan merupakan wilayah perbukitan kapur yang cenderung panas dan kering. Wilayah Kabupaten Blitar selatan terus berusaha mengembangkan segala potensi yang dimiliki. Daya tarik serta potensi kekayaan yang dimiliki Kabupaten Blitar bukan hanya pada sumber daya alam tetapi juga produksi hasil bumi yang melimpah contohnya seperti hasil peternakan dan perikanan serta hasil tambang yang tersebar di wilayah Kabupaten Blitar selatan. Selain itu kekayaan budaya dan peninggalan sejarah yang bernilai luhur tinggi menjadi kekayaan yang tidak ternilai. Selain itu berbagai kemudahan perijinan dan investasi atau usaha yang kondusif didukung oleh stabilitas sosial politik merupakan modal utama yang dapat menjadi “*point of essential*” terutama jaminan untuk investor dan seluruh masyarakat untuk terlibat dalam pengembangan Kabupaten Blitar.

c. Kependudukan

Penduduk merupakan salah satu elemen utama dalam suatu daerah maupun pemerintahan. Jumlah dan kualitas dari penduduk atau sumber daya manusia suatu daerah sangat mempengaruhi proses pembangunan di daerahnya, hal tersebut tak terkecuali dengan Kabupaten Blitar. Adapun jumlah penduduk Kabupaten Blitar pada tahun 2014 mencapai 1.140.793 jiwa, yang terdiri dari penduduk perempuan 569.490 jiwa dan laki-laki 571.303 jiwa. Tingkat pertumbuhan penduduk di Kabupaten Blitar mencapai 0,80% dengan kepadatan

penduduk sekitar 729 km² . Jumlah penduduk di Kabupaten Blitar untuk masing–masing kecamatan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Blitar Tahun 2014

Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan (Jiwa/Km ²)
[1]	[2]	[3]	[4]
Bakung	111,24	25.463	229
Wonorto	164,54	35.552	216
Panggungrejo	119,04	41.215	346
Wates	68,76	28.141	409
Binangun	76,79	42.733	556
Sutojayan	44,20	47.670	1.079
Kademangan	105,28	64.960	617
Kanigoro	55,55	76.108	1.370
Talun	49,78	60.427	1.214
Selopuro	39,29	39.759	1.012
Kesamben	56,96	48.444	850
Selorejo	52,23	34.924	669
Doko	70,95	37.747	532
Wlingi	66,36	50.168	756
Gandusari	88,23	66.516	754
Garum	54,56	64.337	1.179
Nglegok	92,56	69.385	750
Sanankulon	33,33	55.242	1.657
Ponggok	103,83	100.303	966
Srengat	53,98	64.441	1.194
Wonodadi	40,35	46.744	1.158
Udanawu	40,98	40.514	989
Jumlah	1588,79	1.140.793	718

Sumber : blitarkab.bps.go.id, 2014.

Berdasarkan data yang tersaji dalam tabel tersebut diketahui bahwa jumlah penduduk Kabupaten Blitar berdasarkan data sensus tahun 2014 adalah sejumlah

1.140.793 jiwa, dengan kepadatan 718 jiwa/km². Sedikit banyaknya jumlah penduduk Kabupaten Blitar tersebut pasti berpengaruh terhadap proses pemerintahan dan pembangunan daerah, termasuk di dalamnya proses pembangunan sektor pariwisata.

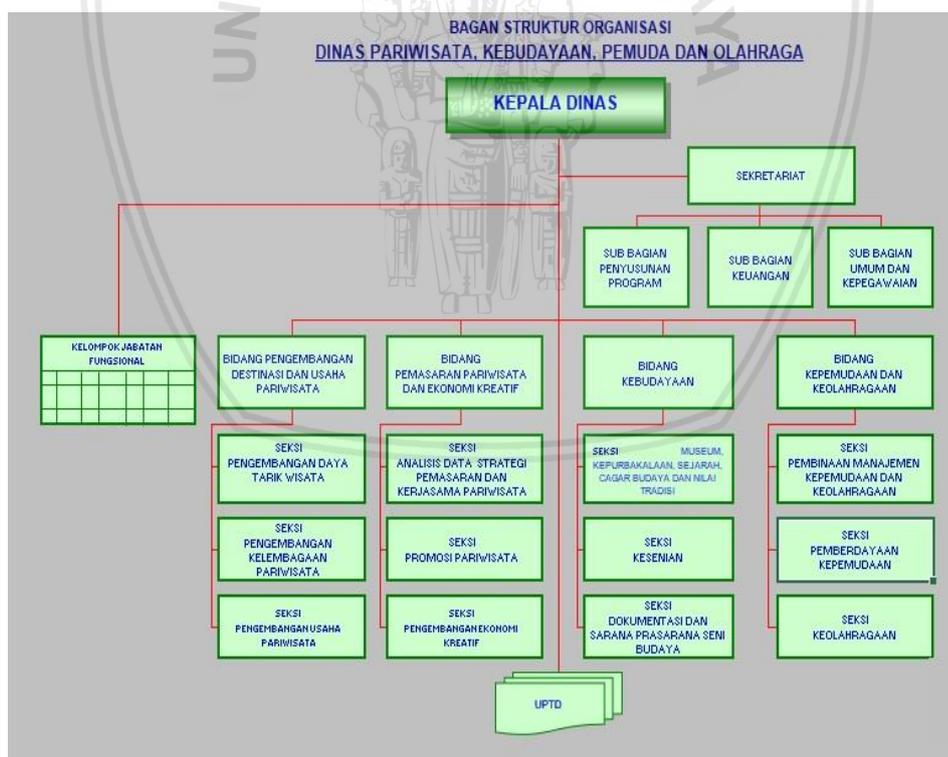
2. Gambaran Umum Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar

a. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar dalam menjalankan tugas dan fungsinya ditetapkan susunan organisasi sebagai berikut :

- 1) Kepala Dinas;
- 2) Sekretaris, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Penyusunan Program.
 - b) Sub Bagian Keuangan.
 - c) Sub Bagian Umum.
- 3) Bidang Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata, terdiri dari :
 - a) Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata
 - b) Seksi Pengembangan Kelembagaan Pariwisata
 - c) Seksi Pengembangan Usaha Pariwisata
- 4) Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, terdiri dari :
 - a) Seksi Analisis Data, Strategi Pemasaran dan Kerjasama Pariwisata
 - b) Seksi Promosi Pariwisata.

- c) Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- 5) Bidang Kebudayaan, terdiri dari :
- Seksi Museum, Kepurbakalaan, Sejarah, Cagar Budaya dan Nilai Tradisi.
 - Seksi Kesenian.
 - Seksi Dokumentasi dan Sarana Prasarana Seni Budaya.
- 6) Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan, terdiri dari :
- Seksi Manajemen Kepemudaan dan Keolahragaan.
 - Seksi Kepemudaan.
 - Seksi Keolahragaan.



Gambar 4.2 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar

Sumber : disparbudpora.blitarkab.go.id

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing – masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing – masing. Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah – langkah yang diperlukan. Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing – masing dan memberikan bimbingan seperlunya bagi pelaksanaan tugas bawahannya. Setiap pemimpin sebuah organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing – masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk lebih lanjut kepada bawahannya. Dalam menyampaikan laporan masing – masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

b. Tugas Pokok dan Fungsi

Berangkat dari ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No. 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang mengukuhkan terbentuknya Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Blitar, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor 64 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga adalah unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga selain melaksanakan berbagai urusan pemerintahan dan tata usaha, juga mempunyai fungsi utama sebagai berikut : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga; b. Penyelenggaraan urusan pelayanan umum di bidang Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga; d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; e. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1) Kepala Dinas

Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas membantu Bupati memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata, bidang Kebudayaan, bidang Pemuda, dan bidang Olah Raga yang menjadi kewenangan daerah

serta tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi :

- a) Merumuskan kebijakan teknis di bidang Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga;
 - b) Memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga;
 - c) Melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas pada bidang Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga;
 - d) Melaksanakan pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - e) Mengkoordinasikan pelaksanaan urusan tata usaha dinas;
 - f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 2) Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengumpulkan dan mengolah data dalam menyusun rencana program, monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan, menyelenggarakan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan urusan umum serta memberikan pelayanan administrasi kepada semua unit kerja di lingkungan Dinas. Untuk melaksanakan tugas, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a) Mengkoordinasikan rencana kegiatan dan program kerja Dinas;
- b) Memimpin pemantauan dan evaluasi hasil program kerja Dinas;

- c) Mengkoordinasikan penyusunan laporan hasil pemantauan program kerja Dinas;
- d) Memimpin pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan;
- e) Memimpin pelaksanaan fungsi tata usaha keuangan pada Dinas;
- f) Memimpin pengelolaan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai;
- g) Memimpin pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai;
- h) Memimpin pengelolaan dan pengadministrasian perlengkapan kantor, pemanfaatan dan perawatan inventaris kantor;
- i) Mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan teknis administrasi kepala dinas dan semua unit organisasi dilingkungan Dinas;
- j) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

1) Sub Bagian Penyusunan Program

Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas menghimpun dan mengolah data dalam rangka menyusun rencana program dinas, monitoring dan evaluasi pelaporan serta penyusunan laporan. Sub Bagian Penyusunan Program Mempunyai fungsi:

- a) Mengumpulkan bahan dan menganalisa data guna penyusunan rencana kegiatan dan program kerja dinas;
- b) Melaksanakan Pemantauan dan evaluasi hasil program kerja dinas;

- c) Menghimpun dan menganalisa data guna penyajian informasi tentang Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga;
- d) Menganalisa hasil pelaksanaan program dinas;
- e) Mengkoordinasikan dalam penyusunan laporan hasil program kerja dinas;
- f) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2) Sub Bagian Keuangan

Kepala Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas melakukan perencanaan anggaran pembiayaan, pengelolaan dan mengkoordinir penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan. Untuk melaksanakan tugas, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

- a) Menghimpun data dan menyiapkan bahan kebutuhan dalam rangka penyusunan anggaran keuangan Dinas;
- b) Melaksanakan pengelolaan anggaran keuangan belanja langsung maupun belanja tidak langsung;
- c) Melaksanakan penyusunan, penatausahaan, verifikasi, dan pelaporan keuangan, serta pengujian pembayaran;
- d) Melaksanakan pengujian, penatausahaan, verifikasi, dan pelaporan perintah pembayaran;
- e) Melaksanakan penatausahaan kas dan urusan belanja anggaran kegiatan kebutuhan kantor;

- f) Menyusun kebutuhan operasional, verifikasi data dan dokumen keuangan, serta pelaporan keuangan;
 - g) Melaksanakan pengujian terhadap data dan dokumen permintaan pembayaran keuangan, serta dokumen pendukung;
 - h) Melaksanakan penatausahaan data dan implementasi sistem informasi, pelaporan data dan perkembangan realisasi permintaan pembayaran keuangan dan perkembangan realisasi pencairan anggaran;
 - i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan surat-menyurat, perlengkapan, rumah tangga dan memelihara barang – barang inventaris serta laporan berkala. Untuk melaksanakan tugas, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a) Menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian di lingkungan dinas;
- b) Menyelenggarakan urusan rumah tangga, rapat – rapat, tamu – tamu dinas dan pelaksanaan kehumasan;
- c) Menyelenggarakan urusan ketatausahaan, surat menyurat dan kearsipan;
- d) Menyusun rencana kebutuhan barang, termasuk inventarisasi barang, pengadaan, perawatan dan pemeliharaan barang perlengkapan dinas;

- e) Melaksanakan penerbitan, pengamanan dan pemeliharaan kebersihan kantor dan lingkungan sekitarnya;
- f) Menyusun laporan tahunan tentang barang inventarisasi kantor; Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

4) Bidang Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata

Bidang Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengembangan Daya Tarik Wisata, Pengembangan Kelembagaan Pariwisata, dan Pengembangan Usaha Pariwisata, dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a) Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang pengembangan daya tarik wisata, pengembangan kelembagaan pariwisata dan pengembangan usaha pariwisata;
- b) Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan analisis kegiatan di bidang pengembangan daya tarik wisata, pengembangan kelembagaan pariwisata dan pengembangan usaha pariwisata;
- c) Melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan daya tarik wisata, pengembangan kelembagaan pariwisata dan pengembangan usaha pariwisata;
- d) Melaksanakan kebijakan di bidang pembangunan dan perintisan daya tarik wisata dalam rangka pertumbuhan destinasi pariwisata

dan pengembangan daerah serta peningkatan kualitas dan daya saing pariwisata;

- e) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan daya tarik wisata, pengembangan kelembagaan pariwisata dan pengembangan usaha pariwisata;
- f) Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan daya tarik wisata, pengembangan kelembagaan pariwisata dan pengembangan usaha pariwisata;
- g) Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan daya tarik wisata, pengembangan kelembagaan pariwisata dan pengembangan usaha pariwisata;
- h) Mengevaluasi dan melaporkan kegiatan di bidang pengembangan daya tarik wisata, pengembangan kelembagaan pariwisata dan pengembangan usaha pariwisata;
- i) Memberikan dukungan dan penghargaan bagi para pelaku kepariwisataan berprestasi dan berdedikasi;
- j) Melaksanakan administrasi Bidang Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata;
- k) Melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

5) Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata

Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,

standar, prosedur, dan kriteria, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perancangan destinasi, amenitas, aksesibilitas dan ekosistem pariwisata dalam rangka pengembangan daya tarik wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan, dalam melaksanakan tugas, Kepala Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata menyelenggarakan fungsi:

- a) Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang perancangan destinasi, amenitas, aksesibilitas dan ekosistem pariwisata dalam rangka pengembangan daya tarik wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan;
- b) Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan analisis kegiatan di bidang perancangan destinasi, amenitas, aksesibilitas dan ekosistem pariwisata dalam rangka pengembangan daya tarik wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan;
- c) Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perancangan destinasi, amenitas, aksesibilitas dan ekosistem pariwisata dalam rangka pengembangan daya tarik wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan;
- d) Melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang perancangan destinasi, amenitas, aksesibilitas dan ekosistem

pariwisata dalam rangka pengembangan daya tarik wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan;

- e) Melaksanakan kebijakan di bidang perancangan destinasi, amenitas, aksesibilitas dan ekosistem pariwisata dalam rangka pengembangan daya tarik wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan; Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perancangan destinasi, amenitas, aksesibilitas dan ekosistem pariwisata dalam rangka pengembangan daya tarik wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan;
- f) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang perancangan destinasi, amenitas, aksesibilitas dan ekosistem pariwisata dalam rangka pengembangan daya tarik wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan;
- g) Melaksanakan administrasi Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata;
- h) Melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata.

6) Seksi Pengembangan Kelembagaan Pariwisata

Seksi Pengembangan Kelembagaan Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan

hubungan kelembagaan kepariwisataan, penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan, pengembangan sadar wisata, pengembangan potensi masyarakat serta pengendalian transformasi. Seksi Pengembangan Kelembagaan Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a) Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang pengembangan hubungan kelembagaan kepariwisataan, penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan, pengembangan sadar wisata, pengembangan potensi masyarakat serta pengendalian transformasi;
- b) Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan analisis kegiatan di bidang pengembangan hubungan kelembagaan kepariwisataan, penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan, pengembangan sadar wisata, pengembangan potensi masyarakat serta pengendalian transformasi;
- c) Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan hubungan kelembagaan kepariwisataan, penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan, pengembangan sadar wisata,

- pengembangan potensi masyarakat serta pengendalian transformasi;
- d) Melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan hubungan kelembagaan kepariwisataan, penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan, pengembangan sadar wisata, pengembangan potensi masyarakat serta pengendalian transformasi;
- e) Melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan hubungan kelembagaan kepariwisataan, penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan, pengembangan sadar wisata, pengembangan potensi masyarakat serta pengendalian transformasi;
- f) Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan hubungan kelembagaan kepariwisataan, penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan, pengembangan sadar wisata, pengembangan potensi masyarakat serta pengendalian transformasi;
- g) Mengevaluasi dan melaporkan kegiatan di bidang pengembangan hubungan kelembagaan kepariwisataan, penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan, pengembangan sadar wisata,

pengembangan potensi masyarakat serta pengendalian transformasi;

- h) Memberikan dukungan dan penghargaan bagi para pelaku kepariwisataan berprestasi dan berdedikasi;
- i) Melaksanakan administrasi Seksi Pengembangan Kelembagaan Pariwisata;
- j) Melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata.

7) Seksi Pengembangan Usaha Pariwisata

Seksi Pengembangan Usaha Pariwisata mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kemitraan usaha pariwisata, tanda daftar usaha pariwisata, rekomendasi penerbitan ijin usaha pariwisata, standar usaha pariwisata, sertifikasi usaha pariwisata, dan investasi usaha pariwisata. Seksi Pengembangan Usaha Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a) Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang kemitraan usaha pariwisata, tanda daftar usaha pariwisata, rekomendasi penerbitan ijin usaha pariwisata, standar usaha pariwisata, sertifikasi usaha pariwisata, dan investasi usaha pariwisata;

- b) Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan analisis kegiatan di bidang kemitraan usaha pariwisata, tanda daftar usaha pariwisata, rekomendasi penerbitan ijin usaha pariwisata, standar usaha pariwisata, sertifikasi usaha pariwisata, dan investasi usaha pariwisata;
- c) Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kemitraan usaha pariwisata, tanda daftar usaha pariwisata, rekomendasi penerbitan ijin usaha pariwisata, standar usaha pariwisata, sertifikasi usaha pariwisata, dan investasi usaha pariwisata;
- d) Melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kemitraan usaha pariwisata, tanda daftar usaha pariwisata, rekomendasi penerbitan ijin usaha pariwisata, standar usaha pariwisata, sertifikasi usaha pariwisata, dan investasi usaha pariwisata;
- e) Melaksanakan kebijakan di bidang kemitraan usaha pariwisata, tanda daftar usaha pariwisata, rekomendasi penerbitan ijin usaha pariwisata, standar usaha pariwisata, sertifikasi usaha pariwisata, dan investasi usaha pariwisata;
- f) Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kemitraan usaha pariwisata, tanda daftar usaha pariwisata, rekomendasi penerbitan ijin usaha pariwisata, standar usaha pariwisata, sertifikasi usaha pariwisata, dan investasi usaha pariwisata;

- g) Mengevaluasi dan melaporkan kegiatan di bidang kemitraan usaha pariwisata, tanda daftar usaha pariwisata, rekomendasi penerbitan ijin usaha pariwisata, standar usaha pariwisata, sertifikasi usaha pariwisata, dan investasi usaha pariwisata;
- h) Melaksanakan administrasi Seksi Pengembangan Usaha Pariwisata;
- i) Melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata.

8) Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang Analisis Data, Strategi Pemasaran dan Kerjasama Pariwisata, Promosi Pariwisata, serta Pengembangan Ekonomi Kreatif. Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a) Menyiapkan perumusan kebijakan pada bidang Analisis Data, Strategi Pemasaran dan Kerjasama Pariwisata, Promosi Pariwisata, serta Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- b) Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan analisis kegiatan di bidang Analisis Data, Strategi Pemasaran dan Kerjasama Pariwisata, Promosi Pariwisata, serta Pengembangan Ekonomi Kreatif;

- c) Melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Analisis Data, Strategi Pemasarandan Kerjasama Pariwisata, Promosi Pariwisata, serta Pengembangan Ekonomi Kreatif;
 - d) Melaksanaa kebijakan di bidang Analisis Data, Strategi Pemasarandan Kerjasama Pariwisata, Promosi Pariwisata, serta Pengembangan Ekonomi Kreatif;
 - e) Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Analisis Data, Strategi Pemasarandan Kerjasama Pariwisata, Promosi Pariwisata, serta Pengembangan Ekonomi Kreatif;
 - f) Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Analisis Data, Strategi Pemasarandan Kerjasama Pariwisata, Promosi Pariwisata, serta Pengembangan Ekonomi Kreatif;
 - g) Mengevaluasi dan melaporkan di bidang Analisis Data, Strategi Pemasaran dan Kerjasama Pariwisata, Promosi Pariwisata, serta Pengembangan Ekonomi Kreatif;
 - h) Melaksanakan administrasi Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - i) Melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- 9) Seksi Analisis Data, Strategi Pemasaran dan Kerjasama Pariwisata
- Seksi Analisis Data, Strategi Pemasaran dan Kerjasama Pariwisata mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan

kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang analisis data pasar pariwisata, profil pasar, target pasar, penyusunan strategi pemasaran pariwisata, pengembangan kerjasama kemitraan, pertukaran wisatawan, serta pemantauan dan evaluasi pemasaran pariwisata. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Analisis Data, Strategi Pemasaran dan Kerjasama Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a) Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang analisis data pasar pariwisata, profil pasar, target pasar, penyusunan strategi pemasaran pariwisata, pengembangan kerjasama kemitraan, pertukaran wisatawan, serta pemantauan dan evaluasi pemasaran pariwisata;
- b) Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan analisis kegiatan di bidang analisis data pasar pariwisata, profil pasar, target pasar, penyusunan strategi pemasaran pariwisata, pengembangan kerjasama kemitraan, pertukaran wisatawan, serta pemantauan dan evaluasi pemasaran pariwisata;
- c) Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang analisis data pasar pariwisata, profil pasar, target pasar, penyusunan strategi pemasaran pariwisata, pengembangan kerjasama

kemitraan, pertukaran wisatawan, serta pemantauan dan evaluasi pemasaran pariwisata;

- d) Melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang analisis data pasar pariwisata, profil pasar, target pasar, penyusunan strategi pemasaran pariwisata, pengembangan kerjasama kemitraan, pertukaran wisatawan, serta pemantauan dan evaluasi pemasaran pariwisata;
- e) Melaksanakan kebijakan di bidang analisis data pasar pariwisata, profil pasar, target pasar, penyusunan strategi pemasaran pariwisata, pengembangan kerjasama kemitraan, pertukaran wisatawan, serta pemantauan dan evaluasi pemasaran pariwisata;
- f) Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang analisis data pasar pariwisata, profil pasar, target pasar, penyusunan strategi pemasaran pariwisata, pengembangan kerjasama kemitraan, pertukaran wisatawan, serta pemantauan dan evaluasi pemasaran pariwisata;
- g) Mengevaluasi dan melaporkan kegiatan di bidang analisis data pasar pariwisata, profil pasar, target pasar, penyusunan strategi pemasaran pariwisata, pengembangan kerjasama kemitraan, pertukaran wisatawan, serta pemantauan dan evaluasi pemasaran pariwisata;
- h) Melaksanakan administrasi Seksi Analisis Data, Strategi Pemasaran dan Kerjasama Pariwisata;

- i) Melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

10) Seksi Promosi Pariwisata

Seksi Promosi Pariwisata mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pameran, festival, promosi investasi, promosi media, publikasi, wisata pertemuan, konvensi, perjalanan insentif, dan perjalanan wisata pengenalan pasar. Seksi Promosi Pariwisata menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a) Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pameran, festival, promosi investasi, promosi media, publikasi, wisata pertemuan, konvensi, perjalanan insentif, dan perjalanan wisata pengenalan pasar;
- b) Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan analisis kegiatan di bidang penyelenggaraan pameran, festival, promosi investasi, promosi media, publikasi, wisata pertemuan, konvensi, perjalanan insentif, dan perjalanan wisata pengenalan pasar;
- c) Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyelenggaraan pameran, festival, promosi investasi, promosi

media, publikasi, wisata pertemuan, konvensi, perjalanan insentif, dan perjalanan wisata pengenalan pasar;

- d) Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan penyelenggaraan pameran, festival, promosi investasi, promosi media, publikasi, wisata pertemuan, konvensi, perjalanan insentif, dan perjalanan wisata pengenalan pasar;
- e) Melakukan koordinasi di bidang penyelenggaraan pameran, festival, promosi investasi, promosi media, publikasi, wisata pertemuan, konvensi, perjalanan insentif, dan perjalanan wisata pengenalan pasar;
- f) Melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan pameran, festival, promosi investasi, promosi media, publikasi, wisata pertemuan, konvensi, perjalanan insentif, dan perjalanan wisata pengenalan pasar;
- g) Mengevaluasi dan melaporkan kegiatan di bidang penyelenggaraan pameran, festival, promosi investasi, promosi media, publikasi, wisata pertemuan, konvensi, perjalanan insentif, dan perjalanan wisata pengenalan pasar;
- h) Melaksanakan administrasi Seksi Promosi Pariwisata;
- i) Melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

11) Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif

Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang periklanan (*advertising*), arsitektur, pasar barang seni, kerajinan (*craft*), desain, fesyen (*fashion*), video, film, fotografi, permainan interaktif (*game*), musik, seni pertunjukan (*showbiz*), penerbitan, percetakan, layanan komputer, piranti lunak (*software*), televisi dan radio (*broadcasting*), dan kuliner. Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi:

- a) Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang periklanan (*advertising*), arsitektur, pasar barang seni, kerajinan (*craft*), desain, fesyen (*fashion*), video, film, fotografi, permainan interaktif (*game*), musik, seni pertunjukan (*showbiz*), penerbitan, percetakan, layanan computer, piranti lunak (*software*), televisi dan radio (*broadcasting*), dan kuliner;
- b) Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan analisis kegiatan di bidang periklanan (*advertising*), arsitektur, pasar barang seni, kerajinan (*craft*), desain, fesyen (*fashion*), video, film, fotografi, permainan interaktif (*game*), musik, seni pertunjukan (*showbiz*), penerbitan, percetakan, layanan computer, piranti lunak (*software*), televisi dan radio (*broadcasting*), dan kuliner;

- c) Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang periklanan (*advertising*), arsitektur, pasar barang seni, kerajinan (*craft*), desain, fesyen (*fashion*), video, film, fotografi, permainan interaktif (*game*), musik, seni pertunjukan (*showbiz*), penerbitan, percetakan, layanan computer, piranti lunak (*software*), televisi dan radio (*broadcasting*), dan kuliner;
- d) Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang periklanan (*advertising*), arsitektur, pasar barang seni, kerajinan (*craft*), desain, fesyen (*fashion*), video, film, fotografi, permainan interaktif (*game*), musik, seni pertunjukan (*showbiz*), penerbitan, percetakan, layanan computer, piranti lunak (*software*), televisi dan radio (*broadcasting*), dan kuliner;
- e) Melakukan koordinasi dan kerjasama di bidang periklanan (*advertising*), arsitektur, pasar barang seni, kerajinan (*craft*), desain, fesyen (*fashion*), video, film, fotografi, permainan interaktif (*game*), musik, seni pertunjukan (*showbiz*), penerbitan, percetakan, layanan computer, piranti lunak (*software*), televisi dan radio (*broadcasting*), dan kuliner;
- f) Melaksanakan kebijakan di bidang periklanan (*advertising*), arsitektur, pasar barang seni, kerajinan (*craft*), desain, fesyen (*fashion*), video, film, fotografi, permainan interaktif (*game*), musik, seni pertunjukan (*showbiz*), penerbitan, percetakan, layanan

computer, piranti lunak (*software*), televisi dan radio (*broadcasting*), dan kuliner;

g) Mengevaluasi dan melaporkan kegiatan di bidang periklanan (*advertising*), arsitektur, pasar barang seni, kerajinan (*craft*), desain, fesyen (*fashion*), video, film, fotografi, permainan interaktif (*game*), musik, seni pertunjukan (*showbiz*), penerbitan, percetakan, layanan computer, piranti lunak (*software*), televisi dan radio (*broadcasting*), dan kuliner;

h) Melaksanakan administrasi Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif; dan

i) Melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

12) Bidang Kebudayaan

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas penyiapan, perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Museum, Kepurbakalaan, Sejarah, Cagar Budaya Dan Nilai Tradisi, Kesenian, Dokumentasi Dan Sarana Prasarana Seni Budaya. Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a) Menyusun perumusan kebijakan di bidang Kebudayaan;

b) Menyusun, mendata, merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan dan program kerja Bidang Kebudayaan;

c) Menyusun Standar Operasional Prosedur, dan Kinerja di bidang Kebudayaan;

- d) Memberikan Rekomendasi/pertimbangan pemberian ijin dibidang Kebudayaan;
 - e) Melaksanakan pembinaan dan pelestarian Kebudayaan;
 - f) Melaksanakan pembinaan ketahanan budaya daerah dan nasional;
 - g) Melaksanakan kebijakan di bidang peningkatan pemahaman Museum, Kepurbakalaan, Cagar Budaya dan Tradisi Budaya;
 - h) Melaksanakan evaluasi, monitoring dan pelaporan di bidang Kebudayaan;
 - i) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
- 13) Seksi Museum, Kepurbakalaan, Sejarah, Cagar Budaya Dan Nilai Tradisi
- Seksi Museum, Kepurbakalaan, Sejarah, Cagar Budaya Dan Nilai Tradisi sebagaimana dimaksud mempunyai tugas penyusunan,pendataan, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Museum, Kepurbakalaan, Sejarah, Cagar Budaya Dan Nilai Tradisi.Seksi Museum, Kepurbakalaan, Sejarah, Cagar Budaya Dan Nilai Tradisi mempunyai fungsi :
- a) Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan pengembangan Museum, Kepurbakalaan, Sejarah, Cagar Budaya Dan Nilai Tradisi;
 - b) Melaksanakan Pendataan dan Pendaftaran terhadap benda, bangunan, struktur, situs, kawasan yang diduga Cagar Budaya dan Purbakala;

- c) Memfasilitasi Tim Ahli Cagar Budaya dan Purbakala untuk memberikan rekomendasi kepada Bupati dalam penetapan Sejarah, Cagar Budaya dan Purbakala;
- d) Melaksanakan dan atau memfasilitasi penggalian terhadap benda, bangunan, struktur, situs, kawasan yang diduga Cagar Budaya dan Purbakala;
- e) Melaksanakan dan fasilitasi pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisi; Memberikan dukungan dan pemberian penghargaan pada tokoh pelaku sejarah dan pelestari Tradisi;
- f) Melaksanakan pembinaan terhadap para pelaku Museum, Kepurbakalaan, Sejarah, Cagar Budaya dan Nilai Tradisi;
- g) Menyelenggarakan bimbingan, penyuluhan serta penyebaran informasi tentang Museum, Kepurbakalaan, Sejarah, Cagar Budaya Dan Nilai Tradisi;
- h) Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan kegiatan dibidang Museum, Kepurbakalaan, Sejarah, Cagar Budaya Dan Nilai Tradisi;
- i) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

14) Seksi Kesenian

Seksi Kesenian mempunyai tugas penyusunan, pendataan, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Seksi Kesenian mempunyai fungsi :

- a) Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan Pelestarian dan Pengembangan Kesenian daerah;

- b) Menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis tentang pembinaan kesenian daerah;
- c) Menyiapkan bahan pemberian bantuan penyebarluasan seni antar Daerah Kabupaten/kota;
- d) Menyiapkan bahan rekomendasi usulan karya industri seni budaya untuk dipatenkan;
- e) Melaksanakan dan fasilitasi kegiatan pelestarian dan pengembangan seni budaya;
- f) Memberikan dukungan dan penghargaan dibidang pelestarian dan pengembangan kesenian daerah;
- g) Menyiapkan dan fasilitasi pengiriman misi kesenian dan promosi kesenian keluar daerah;
- h) Melaksanakan pembinaan seni budaya dan pelaku seni budaya;
- i) Melaksanakan dan Memfasilitasi penyelenggaraan festival kesenian rakyat;
- j) Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan kegiatan dibidang pelestarian dan pengembangan kesenian;
- k) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

15) Seksi Dokumentasi Dan Sarana Prasarana Seni Budaya

Seksi Dokumentasi Dan Sarana Prasarana Seni Budaya mempunyai tugas penyusunan, pendataan, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Dokumentasi Dan Sarana Prasarana Seni Budaya. Seksi Dokumentasi Dan Sarana Prasarana Seni Budaya mempunyai fungsi :

- a) Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan Dokumentasi Seni Budaya Daerah;
 - b) Menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis tentang Dokumentasi Seni Budaya Daerah;
 - c) Melaksanakan pendataan kesenian rakyat, senimandan budaya yang berkembang dimasyarakat;
 - d) Menyiapkan bahan guna memberikan rekomendasi/pertimbangan atas pemberian ijin dibidang kesenian;
 - e) Melaksanakan Pendokumentasian Seni Budaya Daerah;
Melaksanakan penelitian seni budaya daerah;
 - f) Pengadaan sarana dan prasarana seni budaya daerah;
 - g) Melaksanaa pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana seni budaya;
 - h) Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan kegiatan dibidang Dokumentasi Seni Budaya Daerah;
 - i) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- 16) Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan

Bidang Kepemudaan dan keolahragaan sebagaimana dimaksud,mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pariwisata,Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga, yang meliputi Pemberdayaan Pemuda olahraga, Pembinaan manajemen Kelembagaan Pemuda olahraga dan Kerjasama Kepemudaan dan

keolahragaan .Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan, pendataan, perencanaan dan pelaksanaan pemberdayaan kepemudaan, keolahragaan, pembinaan manajemen, kelembagaan kepemudaankeolahragaan dan kerjasama lembaga kepemudaan keolah ragaan serta prestasi di bidang pemuda olahraga;
- b) Pelaksanaan kegiatan dalam rangka pemberdayaan pemuda, olahraga dan pembinaan manajemen, kelembagaan pemuda olahraga dan kerjasama lembaga kepemudaan dan keolahragaan;
- c) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan;
- d) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

17) Seksi Pembinaan Manajemen Kepemudaan dan Keolahragaan

Kepala Seksi Pembinaan Manajemen kepemudaan dan Keolahragaan mempunyai tugas pendataan, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pembinaan Manajemen kepemudaan dan KeolahragaanSeksi Pembinaan Manajemen kepemudaan dan Keolahragaan mempunyai fungsi :

- a) Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan pembinaan manajemen kepemudaan dan keolahragaan;
- b) Melaksanakan peningkatan mutu organisasi, tenaga kepemudaan dan keolahragaan;

- c) Menyiapkan bahan pembinaan manajemen organisasi kepemudaan dan keolahragaan melalui pendidikan dan pelatihan;
 - d) Melaksanakan fasilitasi kemitraan dan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam rangka pembinaan manajemen kepemudaan dan keolahragaan;
 - e) Melaksanakan pendataan lembaga kepemudaan dan keolahragaan;
 - f) Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terkait dengan pembinaan manajemen kepemudaan dan keolahragaan;
 - g) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- 18) Seksi Pemberdayaan Kepemudaan
- Seksi Pemberdayaan Kepemudaan mempunyai tugas penyusunan, pendataan, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Pemuda. Seksi Pemberdayaan Kepemudaan mempunyai fungsi :
- a) Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan pemberdayaan pemuda;
 - b) Melaksanakan pendataan potensi kepemudaan dan kelompok usaha pemuda kreatif;
 - c) Melaksanakan fasilitasi kegiatan pemberdayaan pemuda; Melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan produktifitas pemuda melalui pelatihan ketrampilan dan kewirausahaan;
 - d) Melaksanakan pemberdayaan, perintisan, pendampingan dalam rangka peningkatan kewirausahaan pemuda;

- e) Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi kerjasama dalam rangka pemberdayaan pemuda;
- f) Memberikan dukungan dan penghargaan bagi pemuda berprestasi dan berdedikasi;
- g) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan;
- h) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kepemudaan dan keolahragaan.

19) Seksi Keolahragaan

Seksi Keolahragaan mempunyai tugas penyusunan, pendataan, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan pemasyarakatan serta prestasi keolahragaan. Seksi Keolahragaan mempunyai fungsi :

- a) Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta prestasi olahraga;
- b) Menyiapkan bahan dan fasilitasi peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi serta prestasi olahraga;
- c) Menyiapkan bahan pembinaandan fasilitasi olah raga yang berkembang di masyarakat;
- d) Menghimpun bahan dan data dalam rangka pemasyarakatan olah raga melalui pendidikan dan pelatihan;
- e) Melaksanakan fasilitasi pemasyarakatan olah raga dan pembibitan/pembinaan olah ragawan berbakat;
- f) Melaksanakan pembinaan olah raga;

- g) Melaksanakan peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pemasyarakatan olah raga;
- h) Memberikan dukungan dan penghargaan bagi olahragawan berprestasi dan berdedikasi;
- i) Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan bidang pemberdayaan dan pemasyarakatan olah raga;
- j) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang kepemudaan dan keolah

20) Unit Pelaksana Teknis Dinas

Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis operasional dan penunjang Dinas di lapangan. Unit Pelaksana teknis Dinas dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

21) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya, setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Gambaran Umum Kawasan Wisata Penataran

Kawasan Wisata Penataran merupakan suatu kawasan wisata yang terletak di Desa Penataran, Kecamatan Nglepok, Kabupaten Blitar. Kawasan wisata ini berjarak kurang lebih 13 kilometer sebelah utara pusat Kota Blitar. Kawasan Wisata Penataran secara garis besar terbagi menjadi dua zona pariwisata, yaitu zona Candi Penataran dan zona Kolam Renang Penataran. Dua zona tersebut hanya terpisah jarak kurang dari 100 meter. Pada zona Candi Penataran, disitu para wisatawan yang berkunjung akan disuguhi dengan sebuah kompleks candi peninggalan Kerajaan Majapahit yang menempati areal tanah seluas 12.946 meter persegi.

Berdasarkan prasasti yang tersimpan di dalam candi, diperkirakan Candi Penataran ini dibangun pada masa kepemimpinan Raja Srengga dari Kerajaan Kadiri sekitar tahun 1200 masehi yang kemudian berlanjut digunakan hingga masa raja Wikramawardhana, yaitu raja Kerajaan Majapahit yang memimpin sekitar tahun 1415. Pada kitab Desawarnana atau Negarakretagama yang ditulis pada tahun 1365, Candi ini dikenal dengan sebutan “Bangunan Suci Palah” yang pernah dikunjungi oleh Raja Hayam Wuruk dalam perjalanan berkeliling Jawa bagian timur. Kompleks Candi Penataran ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu halaman depan yang ditandai dengan keberadaan arca Dwarapala yang berada di dekat pintu masuk, kemudian bagian bale agung, pendopo teras, Candi Candra Sengkala,, halaman tengah, Candi Naga, Candi Utama, Halaman belakang serta prasasti Palah. Akan tetapi di sisi belakang dari halaman belakang juga terdapat sebuah petirtaan kecl. Bagian yang menjadi ciri khas dari Candi

Penataran adalah Candi Candra Sengkala karena candi tersebut menjadi logo dari Kodam V Brawijaya. Secara umum pengelolaan dan operasional dari destinasi wisata Candi Penataran ini dikelola oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB).

Sedangkan pada zona Kolam Renang Penataran, terdapat destinasi wisata berupa kompleks kolam renang yang di dalamnya tersedia berbagai fasilitas seperti kolam renang anak, *playground*, kolam renang dewasa, kolam ombak hingga pujasera. Tarif masuk di destinasi kolam renang ini adalah sebesar Rp.5.000,-. Selain itu pada kompleks yang sama juga terdapat destinasi *amphitheater* yang terletak di sebelah utara sisi belakang dari kolam renang, *amphitheater* ini dapat digunakan sebagai tempat untuk berbagai acara ataupun pertunjukan. Bersebelahan dengan *amphitheater* juga terdapat wahana yang baru dibangun pada tahun 2017 lalu yaitu gedung film 3D, namun wahana tersebut masih belum beroperasi. Masih pada kompleks Kolam Renang Penataran, disini juga terdapat destinasi Museum Penataran. Pada museum ini tersimpan berbagai koleksi arca, uang kuno, keramik kuno, prasasti hingga benda-benda bersejarah yang didapat dari beberapa daerah di Kabupaten Blitar. Secara umum zona Kolam Renang Penataran ini dikelola oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar kecuali untuk destinasi Museum Penataran yang operasional hariannya dikelola oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB).

Selain menyuguhkan berbagai atraksi atau daya tarik wisata fisik, yang menjadi nilai plus dari Kawasan Wisata Penataran adalah adanya atraksi wisata berupa pagelaran seni. Tiap tahunnya di Kawasan Wisata Penataran selalu ada pagelaran seni yang dihelat, pagelaran seni yang biasa dihelat diantaranya adalah

Purnama Seruling Penataran, Pesona Bumi Penataran, Festival Penataran hingga Kirab Tumpeng Agung Nusantara. Berbagai acara yang bernafaskan kebudayaan tradisional Jawa tersebut biasanya digelar tepatnya di pelataran Candi Penataran.

B. Penyajian Data

1. Penyelenggaraan Peran Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar dalam pengembangan Kawasan Wisata Penataran, yang mana peran tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

Kebijakan teknis adalah kebijakan yang bersifat operasional dari apa yang disebut dengan kebijakan pelaksanaan, yang mana kebijakan pelaksanaan itu sendiri merupakan penjabaran dari kebijakan umum yang menjadi pedoman atau petunjuk utama baik yang bersifat positif maupun negatif yang mencakup wilayah kewenangan instansi yang bersangkutan (Abidin, 2004:25). Peran tersebut sesuai dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata yang menyebutkan bahwa pemerintah kabupaten/kota berwenang menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota. Berkaitan dengan hal ini Bapak Arinal Huda selaku Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar menyatakan sebagai berikut :

“Kawasan Wisata Penataran harus dibangun sesuai dengan treknya, sesuai dengan RPJMD, Kawasan Wisata Penataran merupakan salah satu destinasi yang harus dikembangkan. Untuk menindaklanjuti hal itu, pada tahun 2017 lalu kita membuat *master plan* pembangunan Kawasan Wisata Penataran, dengan itu kita akan lebih mudah melaksanakan teknis

pengembangan Kawasan Wisata Penataran, dan tentu dari *master plan* yang ada itu tidak dapat kita langsung bangun secara keseluruhan, yang mana membutuhkan dana sekitar 12 miliar. Kita bertahap sedikit demi sedikit, bisa jadi nanti 3 sampai 4 tahun baru selesai, karena kan anggaran dari Pemerintah Daerah sangat terbatas”. (Wawancara tanggal 16 April 2019, pukul 08.40 – 09.10 WIB).

Berdasarkan dokumen yang peneliti dapatkan, dalam *master plan* tersebut berisi rencana tahapan pembangunan Kawasan Wisata Penataran yang terdiri dari 3 tahap pembangunan, estimasi anggaran biaya dan berbagai analisis baik fisik maupun nonfisik berkaitan dengan pembangunan Kawasan Wisata Penataran.

Tabel 4.2 Rencana Pembangunan Tahap III Kawasan Wisata Penataran

Rencana Pembangunan Tahap III Kawasan Wisata Penataran		Estimasi Anggaran Biaya
1	Parkir area Kolam dan Diorama	Rp.150.000.000,00,-
2	Parkir utama	Rp.300.000.000,00,-
3	<i>Play ground</i>	Rp.500.000.000,00,-
4	Kamar ganti dan Bilas	Rp.300.000.000,00,-
5	<i>Maintenance</i>	Rp.100.000.000,00,-
6	Pagar pembatas keliling	Rp.350.000.000,00,-
7	Lanjutan Pembangunan <i>Vocal point</i>	Rp.350.000.000,00,-
8	<i>Restaurant</i> apung	Rp.950.000.000,00,-
9	Kolam pancing	Rp.350.000.000,00,-

Sumber : Master plan Kawasan Wisata Penataran, 2017

Berdasarkan berbagai data tersebut dapat diketahui bahwa Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar berkaitan dengan perumusan kebijakan teknis pengembangan Kawasan Wisata Penataran berperan dalam hal perumusan atau pembuatan *master plan* pengembangan Kawasan Wisata Penataran yang dilakukan pada tahun 2017 lalu.

b. Penyelenggaraan Urusan Pelayanan Umum Bidang Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

Berdasarkan Bab I Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan pasal tersebut maka Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar selaku salah satu bagian dari Pemerintah Daerah perlu memiliki peran dalam penyelenggaraan berbagai urusan yang berkaitan dengan fasilitas dan pelayanan dalam bidang pariwisata. Penyelenggaraan itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pemeliharaan dan pengusaha sesuatu, sehingga penyelenggaraan urusan pelayanan umum dalam hal ini terkait dengan upaya pemeliharaan maupun pengusaha pelayanan umum di Kawasan Wisata Penataran dalam konteks pariwisata. Berkaitan dengan hal tersebut Bapak Arinal Huda Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar menyatakan sebagai berikut :

“Ya, jadi menurut kami selaku Pemerintah Kabupaten Blitar, di Kawasan Wisata Penataran tersebut terdapat peninggalan sejarah yang luar biasa sekali dari Kerajaan Majapahit yaitu Candi Penataran, yang mana tentu ini sudah menjadi *landmark* atau ikon pariwisata Kabupaten Blitar ya, sehingga kami merasa perlu untuk mengembangkannya menjadi destinasi wisata yang menarik dan menjadi keunggulan atau ciri khas bagi Kabupaten Blitar. Upaya kita adalah dengan meningkatkan pelayanan di sana, yang kita lakukan adalah dengan membangun dan mengelola berbagai sarana dan prasarannya”. (Wawancara tanggal 16 April 2019, pukul 08.40 – 09.10 WIB).

Berdasarkan penuturan Bapak Arinal Huda tersebut dapat diketahui bahwa Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar selaku salah satu perangkat dari Pemerintah Daerah setempat memiliki peran terhadap upaya penyelenggaraan urusan pelayanan umum kepariwisataan dengan melakukan pemenuhan dan pengelolaan sarana dan prasarana kepariwisataan di Kawasan Wisata Penataran dalam rangka pengembangan Kawasan Wisata Penataran.

Sarana pariwisata itu sendiri diartikan sebagai kelengkapan daerah tujuan wisata yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dalam rangka menikmati perjalanan wisatanya (Suwanto dalam Nawangsari, 2018). Sedangkan prasarana pariwisata adalah semua fasilitas yang memungkinkan agar sarana pariwisata dapat tetap berfungsi sebagaimana mestinya dalam rangka memberikan pelayanan wisatawan (Prasetyo, 2016). Apabila dikaitkan dengan konsep pengembangan pariwisata, maka pemenuhan dan pengelolaan sarana prasarana pariwisata tidak terlepas dari pemenuhan komponen pariwisata itu sendiri. Pengembangan pariwisata pada umumnya meliputi pemenuhan komponen-komponen utama dari pariwisata yang meliputi *attraction*, *accessibility*, *amenities* dan *ancillary service* (Cooper dalam Sunaryo, 2013). Berikut merupakan penjabaran peran dari Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar dalam penyelenggaraan pelayanan umum kepariwisataan melalui pengadaan sarana dan prasarana di Kawasan Wisata Penataran ditinjau dengan komponen - komponen pariwisata :

1) *Attraction* (Atraksi)

Atraksi atau juga dapat disebut objek daya tarik wisata merupakan komponen pariwisata yang cukup signifikan karena dapat menarik minat wisatawan untuk datang ke tempat wisata, yang mana yang dimaksud dengan atraksi ini meliputi *natural resource* seperti gunung, pantai, danau, bukit dan sebagainya. Selain itu juga terdapat atraksi wisata budaya seperti situs arkeologi, festival, pameran, seni pertunjukan hingga ritual masyarakat setempat (Suwena dalam Khotimah, 2017). Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar berkaitan dengan pemenuhan atraksi wisata di Kawasan Wisata Penataran ini dilakukan dengan beberapa pembangunan atau pengadaan beberapa fasilitas fisik hingga penyelenggaraan beberapa *event* dengan bermitra dengan berbagai pihak yang berminat mengadakan pagelaran seni di Kawasan Wisata Penataran. Berikut penjelasan dari Bapak Arinal Huda selaku Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar :

“Sebelumnya yang perlu diketahui adalah bahwa destinasi wisata yang sepenuhnya dikelola oleh pihak Disparbudpora Kabupaten Blitar adalah destinasi kolam renang dan *Amphitheater* Penataran, untuk destinasi Candi Penataran hak pengelolaan sepenuhnya adalah dari BPCB Trowulan, sedangkan untuk destinasi Museum Penataran kami hanya bertanggung jawab dalam hal sarana dan prasarananya, untuk pengelolaan, berbagai benda arkeologi dan operasionalnya itu tanggung jawab pihak BPCB juga. Sejauh ini upaya yang kami lakukan berkaitan dengan daya tarik wisata adalah membangun sesuatu yang dapat meningkatkan daya tarik wisata KWP, yang terkini ya pada tahun 2018 lalu kita bangun itu ada patung Koi di pojok itu depan kolam renang di pinggir jalan raya”.(Wawancara tanggal 16 April 2019, pukul 08.40 – 09.10 WIB).

Pernyataan dari Bapak Arinal Huda tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Sri Suyanti selaku salah satu pegawai Balai Pelestarian Cagar Budaya

(BPCB) yang bertugas mengelola Museum Penataran, berikut pernyataan dari Ibu

Sri Suyanti :

“Kami selaku perwakilan dari pihak BPCB Trowulan yang bertugas di Museum Penataran ini tugasnya ya lebih kepada pelaksanaan dalam hal teknis pengelolaan aset benda-benda bersejarah di sini dan juga pelayanan kepada para pengunjung museum. Berkaitan dengan sarana prasarana memang sepenuhnya tanggung jawab dari pihak Dinas Pariwisata, tapi ya bukan berarti kami tidak ikut merawat berbagai sarana prasarana di sini, kami tiap bulan juga punya kewajiban untuk melakukan lapor bulan ke pihak Dispar Kabupaten Blitar berkenaan dengan kondisi sarana dan prasarana yang ada yang memang merupakan tanggung jawab mereka. Kami juga punya hak untuk mengajukan permohonan atau permintaan berkenaan dengan perbaikan ataupun pengadaan berbagai sarana prasarana di sini, contohnya paling sederhana ya buku, tempat sampah, lampu dan sebagainya, meski kadang ya agak terlambat juga pemenuhannya dari pihak dinas sana, kadang kalau ada keterlambatan kami patungan dulu untuk memenuhinya, tapi harus diakui untuk beberapa bulan terakhir ini respon dari dinas sudah mulai cepat untuk memenuhi kebutuhan Museum” (Wawancara tanggal 23 April 2019, pukul 11.50 - 12.30 WIB).

Pernyataan juga diberikan oleh Bapak Agus Setiono selaku pegawai BPCB yang juga bertugas di Museum Penataran bersama Ibu Sri Suyanti, beliau menambahkan beberapa hal berkaitan dengan apa yang sudah dilakukan oleh pihak Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar dalam hal pemenuhan fasilitas Museum Penataran dan kebutuhan pihak Museum Penataran yang belum terpenuhi. Berikut pernyataan dari Bapak Agus Setiono tersebut :

“Beberapa hal yang sudah dilakukan oleh pihak Disparbudpora yang agak besar ya seperti perbaikan atap museum ini, lalu pengadaan CCTV juga, lalu pengecatan tembok sama perbaikan instalasi listrik. Kalau yang terbaru ya pembuatan pagar dan trotoar depan itu. Jadi Dinas untuk Museum ini ya cenderung menindaklanjuti laporan kita. Sebenarnya masih banyak yang perlu dikembangkan dari museum ini Mas, misal bangunan baru untuk menampilkan koleksi benda bersejarah yang jumlahnya ada 400 lebih yang masih tersimpan di gudang, tentu itu sangat sayang kalau hanya disimpan di gudang. Selain itu museum ini juga masih belum ada tempat terima tamu yang sebenarnya bisa kami gunakan untuk menyambut

rombongan tamu dan memberikan penjelasan pengantar kepada mereka berkaitan dengan koleksi museum ini. Kemudian taman pun kami rasa juga perlu ada perbaikan, pavingnya itu sudah mulai rusak, kemudian tanamannya kurang berwarna – warni. Kami juga sudah mengajukan untuk dibuatkan sumur di depan Mas, biar gampang kalau mau nyiram tanaman, tapi masih belum ada realisasi, padahal kami siap buat menata dan menanami taman museum ini supaya lebih indah”. (Wawancara tanggal 23 April 2019, pukul 11.50 - 12.30 WIB).

Akan tetapi peneliti tidak mendapatkan dokumen bukti adanya pengadaan sarana dan prasarana di Museum Penataran yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar. Sedangkan yang terkait dengan destinasi Candi Penataran, Bapak Masuri selaku pihak BPCB yang bertugas di Candi Penataran menyatakan :

“Semua hal berkaitan dengan sarana, prasarana dan pelayanan terhadap wisatawan dalam area Candi Penataran ini pengelolaannya memang hak dari BPCB, Pihak Disparbudpora hanya berhak melakukan pembangunan di luar area candi, kami dengan Disparbudpora sifatnya lebih dalam hal koordinasi kalau misal mereka ada *event* dengan komunitas tertentu di sini atau terkait perihal permintaan data kunjungan wisatawan ke Candi Penataran”. (Wawancara tanggal 23 April 2019, pukul 14.25 – 14.40 WIB).

Berdasarkan berbagai hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa berkaitan dengan atraksi atau daya tarik wisata yang meliputi situs ataupun benda-benda arkeologi, teknis pengelolaannya merupakan tanggung jawab dari Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB). Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar hanya berwenang atau bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana dari Museum Penataran, yang dalam praktiknya cenderung menindaklanjuti laporan dari operator museum meskipun dalam praktiknya masih sering begitu banyak permintaan dari pihak operator Museum Penataran yang belum terpenuhi. Sedangkan untuk yang berkaitan

dengan pengadaan Patung Koi di depan Kolam Renang Penataran, hal tersebut memang sudah dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar sejak tahun 2018 lalu.



Gambar 4.3 Patung Koi

Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2019.

Selain itu Bapak Arinal Huda dari Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar juga memberikan keterangan mengenai pengadaan sarana prasarana yang berkaitan dengan pemenuhan aspek atraksi berupa *event* di Kawasan Wisata Penataran. Berikut pernyataan dari Bapak Arinal Huda tersebut :

“...kita juga sudah lama punya *amphitheater* yang disitu biasa disewa untuk mengadakan berbagai kegiatan termasuk pertunjukan dan pagelaran seni. Untuk *event* kita cenderung bermitra dengan berbagai komunitas yang biasa mengadakan *event* di KWP, misal seperti Dewan Kesenian Kabupaten Blitar yang biasa mengadakan Purnama Seruling Penataran di pelataran Candi Penataran. Untuk hal itu kita biasanya bantu fasilitasi promosi atau soundingnya dengan sarana media digital seperti medsos dan web, dengan harapan biar atraksi yang diadakan ramai didatangi wisatawan dan harapannya selalu ada *event* rutin tiap tahunnya”. (Wawancara tanggal 16 April 2019, pukul 08.40 – 09.10 WIB).

Berkaitan dengan *Amphitheater* Penataran yang biasa disewa untuk menyelenggarakan berbagai *event* sebagai salah satu faktor untuk meningkatkan

atraksi atau daya tarik wisata, salah satu petugas kebersihan *amphitheater* tersebut yang bernama Agus menuturkan hal sebagai berikut :

“*Amphitheater* ini memang biasa disewa berbagai pihak Mas, biasanya untuk acara seni tapi kadang juga untuk lomba bahkan belum lama ini juga untuk kumpul komunitas motor CB dan miniatur mobil. Ya memang tidak rutin ada acara di sini, kadang sebulan bisa dua kali, kadang Cuma sekali, kadang juga nggak ada acara sama sekali”. (Wawancara tanggal 23 April 2019, pukul 10.30 – 11.10 WIB).

Berdasarkan penuturan dari Bapak Agus tersebut dapat diketahui memang benar di *Amphitheater* Penataran biasa diselenggarakan berbagai *event* yang dilaksanakan oleh berbagai pihak penyewa *amphitheater*, yang mana *event* tersebut juga tidak hanya berupa pagelaran seni saja, tetapi juga lomba hingga *gathering* komunitas tertentu.

Berikut juga terdapat dokumen berkaitan dengan *event* yang berhasil diselenggarakan di Kawasan Wisata Penataran pada tahun 2018 yang Peneliti dapatkan dari Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar :

Tabel 4.3 Event di Kawasan Wisata Penataran Tahun 2018

NO	EVENT	WAKTU PELAKSANAAN
1	Purnama Seruling Penataran (Kidung Wuyung Sang Apanji)	31 Maret 2018
2	Festival Panji Internasional	3 Juli 2018
3	Festival Penataran Kuliner Internasional	2 Juli 2018
4	Kirab Tumpeng Agung Nusantara	11 Juli 2018
5	Pesona Bumi Penataran	6 Agustus 2018

Sumber : Disparbudpora Kabupaten Blitar, 2018.

Selain itu juga terdapat dokumen berupa foto pagelaran Purnama Seruling Penataran yang telah berhasil digelar di Kawasan Wisata Penataran. Berikut foto

pagelaran Purnama Seruling Penataran yang peneliti dapatkan dari *website* Dewan Kesenian Jatim :



Gambar 4.4 Acara Purnama Seruling Penataran di Pelataran Candi Penataran

Sumber : Dkjatim.com

Untuk membuktikan atau memperkuat penuturan dari Bapak Arinal Huda selaku perwakilan dari pihak Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar mengenai promosi atau *sounding* yang dilakukan terhadap berbagai pagelaran yang diselenggarakan di Kawasan Wisata Penataran tersebut, peneliti menyertakan hasil dokumentasi berupa kalender wisata sebagai salah satu sarana yang digunakan untuk mengingatkan atau memberitahukan kepada masyarakat berkaitan berbagai *event* yang akan diselenggarakan di Kabupaten Blitar termasuk di Kawasan Wisata Penataran. Wujud dari kalender wisata tersebut adalah yang sebagai berikut :



Gambar 4.5 Kalender Wisata Kabupaten Blitar 2019

Sumber : Disparbudpora Kabupaten Blitar, 2019.

Kalender wisata merupakan salah satu sarana yang digunakan oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar untuk mempromosikan berbagai *event* yang diselenggarakan di Kawasan Wisata Penataran. Berdasarkan yang tercantum dalam kalender wisata tersebut, terdapat lima *event* yang diselenggarakan di Kawasan Wisata Penataran, yaitu Kirab Tumpeng Agung, Festival Panji, Festival Penataran, Purnama Seruling Penataran dan Pesona Bumi Penataran.

Lebih lanjut berkaitan dengan penyebaran informasi pariwisata, Bapak Arinal Huda menambahkan pernyataan sebagai berikut :

“Selain melalui kalender wisata, untuk penyebaran berbagai informasi wisata, kita juga biasa *share* melalui web kita dan sosial media seperti *Facebook* dan *Instagram* akun kita *Amazing Blitar*, dan untuk berbagai informasi lokasi dan deskripsi destinasi wisata, sekarang sudah dapat terbantu juga tersampaikan melalui aplikasi *Amazing Blitar*”. (Wawancara tanggal 17 Juni 2019, pukul 17.10 – 17.25 WIB).

Berdasarkan penjelasan Bapak Arinal Huda tersebut dapat diketahui bahwa Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar juga melakukan upaya penyebarluasan informasi wisata dengan sarana *website* dan sosial media seperti *Facebook* dengan dan *Instagram* dengan akun bernama *Amazing Blitar* serta juga melalui aplikasi *android* *Amazing Blitar*. Berikut adalah beberapa bentuk promosi pariwisata yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar melalui media sosial :



Gambar 4.6 Bentuk Promosi Melalui Instagram

Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2019.

Selain itu juga terdapat bentuk promosi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar melalui *facebook* dan

website dengan alamat web <http://disparbudpora.blitarkab.go.id> . Berikut bentuk promosi yang dilakukan melalui Facebook :



Gambar 4.7 Bentuk Promosi Melalui Facebook
Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2019.

Berbagai upaya tersebut sejalan dengan Bab VII Pasal 30 Huruf f Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang untuk memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya.

Berdasarkan berbagai data yang telah disajikan, dapat diketahui bahwa Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar dalam menjalankan perannya menyelenggarakan pelayanan umum melalui pengadaan dan pengelolaan sarana prasarana dalam upaya memenuhi komponen atraksi wisata di Kawasan Wisata Penataran adalah dengan melakukan pembangunan Patung Koi untuk menambah atraksi atau daya tarik wisata secara fisik serta bermitra dengan berbagai komunitas atau organisasi yang biasa

menyelenggarakan *event* di Kawasan Wisata Penataran. Berkaitan dengan *event*, pihak Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar cenderung berperan sebagai fasilitator dalam hal promosi yang dalam teknisnya dilakukan melalui sarana *website* dan media sosial yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar. Melalui hal tersebut diharapkan atraksi berupa *event* seni yang diselenggarakan di Kawasan Wisata Penataran dapat berjalan rutin dan ramai didatangi wisatawan.

2) *Accessibility* (Aksesibilitas)

Aksesibilitas dalam pariwisata dimaksudkan sebagai berbagai sarana yang dapat memudahkan wisatawan untuk mencapai atau menuju destinasi wisata yang mereka inginkan. Aksesibilitas wisata ini meliputi petunjuk arah, terminal, bandara hingga alat transportasi (Sunaryo, 2013). Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar dalam pengembangan fisik untuk memenuhi komponen pariwisata yang berkaitan dengan aksesibilitas di Kawasan Wisata Penataran ini adalah dengan melakukan pembangunan trotoar di depan destinasi Kolam Renang Penataran hingga ke utara tepatnya sampai depan Makam Syekh Subakir. Berikut penuturan dari Bapak Arinal Huda selaku Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar :

“Ya jadi kita dalam membangun juga tentu harus berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait ya, kita kerja sesuai porsi kita masing-masing. Untuk yang membangun jalan tentu dari PU, untuk penunjuk arah kita koordinasi dengan Dishub, dan penunjuk arah ke KWP kita pun sudah ada ya. Lahan parkir pun kita juga tidak ada masalah. Kita dari Dinas Pariwisata dalam hal ini secara fisik sudah menyediakan trotoar juga dari depan kolam sampai ke depan makam Syekh Subakir, lalu untuk

kedepannya kita juga berencana membangun *city walk* untuk jalan yang di depan Candi Penataran itu. Kita bersama Kominfo juga sudah menyediakan aplikasi Amazing Blitar yang bisa didownload di HP android, di aplikasi itu masyarakat bisa dengan mudah mengetahui lokasi destinasi wisata yang ada di Blitar dan jarak dari lokasi terkininya”.(Wawancara tanggal 16 April 2019, pukul 08.40 – 09.10 WIB).



Gambar 4.8 Trotoar dan Pagar Pembatas Depan Kolam Renang Penataran

— Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2019

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa peran yang dijalankan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar dalam menyediakan sarana prasarana untuk memenuhi komponen aksesibilitas pariwisata di Kawasan Wisata Penataran selain dengan menyediakan trotoar atau area pedestrian sebagai prasarana bagi pejalan kaki adalah juga dengan berencana membangun *city walk* di depan destinasi Candi Penataran. Sedangkan untuk penunjuk arah, pihak Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar cenderung tidak terlibat langsung untuk pengadaannya, jadi lebih cenderung berkoordinasi dengan pihak Dishub untuk pengadaannya. Selain itu Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar bersama Kominfo Kabupaten Blitar juga telah meluncurkan aplikasi Amazing Blitar bagi pengguna *android*, yang mana dalam aplikasi

tersebut termuat berbagai pilihan destinasi wisata di Kabupaten Blitar beserta rute/peta lokasi, deskripsi singkat, rating, hingga foto tempat destinasi wisatanya.



Gambar 4.9 Aplikasi Amazing Blitar

Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2019.

Berangkat dari hasil observasi peneliti dalam menggunakan aplikasi Amazing Blitar tersebut, Aplikasi Amazing Blitar tersebut belum dapat dikatakan optimal dikarenakan dalam aplikasi tersebut hanya meliputi dua objek wisata saja dari Kawasan Wisata Penataran, yaitu Candi Penataran dan Kolam Renang Penataran. Sedangkan untuk destinasi Museum Penataran belum tersedia informasinya di dalam aplikasi tersebut.

Sedangkan untuk keberadaan penunjuk arah, berdasarkan observasi yang peneliti lakukan memang terbukti ada, namun cukup disayangkan dikarenakan terdapat penunjuk arah yang kondisinya sudah rusak dan tulisannya cenderung

sulit bahkan tidak terbaca, padahal penunjuk arah tersebut terletak di lokasi yang strategis yakni di sebelah Pasar Penataran yang berjarak sekitar 100 meter dari lokasi Candi Penataran. Berikut merupakan foto hasil dokumentasi Peneliti yang Peneliti dapatkan saat melakukan observasi di daerah sekitar Kawasan Wisata Penataran :



Gambar 4.10 Plang Penunjuk Arah ke Candi Penataran

Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2019.

Masih berkaitan dengan plang penunjuk arah, berdasarkan hasil observasi peneliti tidak ditemukan plang penunjuk arah yang bertuliskan destinasi Museum maupun *Amphitheater* Penataran. Hal tersebut pun juga sesuai dengan dengan apa yang dikeluhkan oleh Ibu Sri Suyanti selaku petugas BPCB yang bertugas di Museum Penataran berikut :

“...sayangnya memang untuk saat ini tidak ada plang penunjuk arah ke Museum Penataran. Meskipun letaknya satu kompleks dengan kolam renang tapi kan itu bisa saja membuat wisatawan yang datang fokusnya jadi ke kolam renang saja, padahal ada Museum juga disini”. (Wawancara tanggal 23 April 2019, pukul 11.50 - 12.30 WIB).

Berdasarkan data dan hasil wawancara yang disajikan, maka berkaitan dengan penunjuk arah peran yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda

dan Olahraga Kabupaten Blitar masih cenderung kurang maksimal dikarenakan plang penunjuk arah yang tersedia hanya plang yang menuju ke Candi dan Kolam Renang Penataran saja, itupun untuk penunjuk arah ke Candi Penataran kondisinya sudah rusak.

3) *Amenities* (Amenitas)

Sugiama dalam Khotimah (2017:59) berpendapat bahwa *amenity* wisata meliputi berbagai fasilitas seperti akomodasi (tempat penginapan), penyediaan makanan dan minuman, tempat hiburan, tempat olahraga dan tempat-tempat perbelanjaan (*retailing*) bagi wisatawan. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar melakukan pemenuhan komponen ini di Kawasan Wisata Penataran dengan menyediakan sarana prasarana berupa *space* khusus yang dijadikan pujasera di dalam area Kolam Renang Penataran. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Bapak Arinal Huda dari Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar berikut :

“Kalau bicara *amenity* yang sudah kita penuhi sejak awal adanya kolam renangya seperti tempat makanan dan minuman sudah ada satu paket dalam area destinasi kolam renang ya, di situ ada pujasera. Kemudian pengembangan yang baru kita lakukan itu ada di kolam renang, kita baru menambah wahana baru lagi pada 2018 lalu yaitu kolam anak atau kolam cangkir sebagai sarana hiburan juga khususnya buat anak-anak. Kalau tempat atau sarana hiburan kan *amphitheater* juga bisa jadi tempat hiburan juga ya sebenarnya. Kita 2017 juga sudah bangun gedung film 3D di sebelah *amphitheater* itu, tapi belum beroperasi. Ya selain itu sayangnya kita masih belum ada pusat *souvenir* di sana, untuk kedepannya kita juga berniat untuk mengajak masyarakat setempat untuk membuat *souvenir* yang layak untuk dijual kepada wisatawan”. (Wawancara tanggal 16 April 2019, pukul 08.40 – 09.10 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa yang dilakukan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar dalam

memenuhi komponen *amenities* pariwisata di Kawasan Wisata Penataran adalah dengan melakukan pembangunan fasilitas baru yaitu gedung film 3D yang terletak di sebelah *amphitheater* pada tahun 2017 lalu serta kolam anak atau kolam cangkir yang dibangun pada tahun 2018 lalu. Gedung film dan kolam cangkir tersebut dibangun untuk menambah sarana hiburan di dalam area Kawasan Wisata Penataran. Sedangkan untuk pujasera memang dianggap sudah ada sejak awal adanya kolam renang.

Berkaitan dengan gedung film yang berada di sebelah dari *amphitheater*, salah satu petugas kebersihan *amphitheater* dan gedung film tersebut yang bernama Agus menuturkan hal sebagai berikut :

“Gedung pemutaran film ini masih belum beroperasi ya Mas, namun Insya’Allah akan dioperasikan, karena secara fisik sudah siap digunakan. Rencananya akan digunakan untuk memutar film – film dokumenter tentang Blitar dan pariwisatanya. Ini ya sebagai tambahan wahana wisata di sini.” (Wawancara tanggal 23 April 2019, pukul 10.30 – 11.10 WIB).



Gambar 4.11 Gedung Film (Kiri) dan Amphitheater Penataran

Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2019.

Berdasarkan penuturan dari Bapak Agus dan dokumentasi hasil observasi Peneliti tersebut maka diketahui bahwa memang sudah dibangun gedung film 3D, namun

gedung tersebut masih belumberoperasi. Sedangkan berkaitan dengan keberadaan kolam cangkir, berikut hasil dokumentasi yang peneliti dapatkan dari hasil observasi di Kolam Renang Penataran :



Gambar 4.12 Kolam Cangkir
Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2019

4) *Ancillary Service* (Layanan tambahan)

Ancillary service atau layanan tambahan pariwisata meliputi keberadaan berbagai pihak seperti organisasi atau kelompok tertentu untuk mendorong pengembangan serta pemasaran kepariwisataan dari destinasi wisata bersangkutan (Sugiyama dalam Khotimah 2017:59). Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar dalam hal ini sudah menempatkan beberapa/sejumlah pegawai teknis yang bertugas untuk mengelola Kawasan Wisata Penataran dan memberikan pelayanan kepada wisatawan. Berikut pernyataan Bapak Arinal Huda dari Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar :

“Ya, kita kalau untuk SDM sudah ada yang kita tempatkan di sana ya. Orang-orang kita tersebut kita tempatkan di zona Kolam Renang Penataran sesuai dengan bagian dari wewenang kita. Mereka bertugas untuk mengelola destinasi yang ada di sana sebagai kepanjangan tangan dari kita

yang ada di kantor”.(Wawancara tanggal 16 April 2019, pukul 08.40 – 09.10 WIB).

Pernyataan dari Bapak Arinal Huda tersebut dibenarkan oleh Bapak Wahyudi selaku koordinator petugas tenaga teknis di Kawasan Wisata Penataran. Berikut pernyataan dari beliau :

“Iya jadi memang betul kami disini masih bagian dari Dinas Pariwisata. Kami yang mengelola operasional kesehariannya, terutama untuk kolam renang ya, karena kolam kan tiap hari buka. Kalau Candi sama Museum itu dari BPCB”. (Wawancara tanggal 19 Juni 2019, pukul 10.10 – 10.20 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pihak Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar selama ini sudah menempatkan sejumlah pegawai teknis untuk mengelola operasional keseharian beberapa destinasi di Kawasan Wisata Penataran sesuai dengan wewenang atau tanggung jawab dari Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar.

Selain berdasarkan hasil wawancara, pernyataan dari pihak Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar tersebut juga diperkuat dengan dokumen berupa nama-nama beserta posisi/jabatan dari tenaga teknis Kawasan Wisata Penataran. Berikut merupakan tabel nama dan jabatan petugas teknis dari Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar yang bertugas di Kawasan Wisata Penataran :

Tabel 4.4 Petugas Tenaga Teknis Kawasan Wisata Penataran

NO	NAMA	POSISI/JABATAN
1	Wahyudi	Koordinator/Retribusi
2	Jaenuri Nurdiansyah	Retribusi
3	Lulus Priwibawa, SE	Retribusi
4	Triana Vitasari	Retribusi
5	Yunira	Retribusi
6	Damayanti K.	Retribusi
7	Daniel Kase	Kebersihan
8	Mujianto	Kebersihan
9	Woko Winardi	Kebersihan
10	Joko Wahono	Kebersihan
11	Arif Didin	Kebersihan
12	Boedi Soebagyo	Kebersihan
13	Roji	Kebersihan
14	Agus Nono T.	Kebersihan
15	Agus Wijayanto	Kebersihan
16	Yudizan Endriyono	Juru Parkir Mobil dan Kebersihan
17	Sumadi	Juru Parkir Mobil dan Kebersihan
18	Budi Eko Maryani	Juru Parkir Sepeda Motor
19	Eko Budi S.	Juru Parkir Sepeda Motor
20	Agus Riyadi	Tim SAR
21	Juli Tohari	Tim SAR
22	Dwi Setiyawan	Tim SAR
23	Muji Suwito	Tim SAR
24	CH. V. Tuti M	Kesehatan
25	Agung Purnama	Penjaga Malam
26	Indra Bahaul F.	Penjaga Malam

Sumber : Disparbudpora Kabupaten Blitar, 2019.

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa terdapat 26 petugas tenaga teknis dari Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar yang ditempatkan di Kawasan Wisata Penataran. Mengacu pada hasil wawancara dan dokumen tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar telah berperan dalam memenuhi komponen pariwisata *ancillary service*.

c. Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas Bidang Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

Berdasarkan Bab II Pasal 5 Huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, salah satu prinsip dari penyelenggaraan kepariwisataan adalah memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Mustikawati (2017:2) yang menyatakan bahwa pengembangan sektor pariwisata memiliki peran penting dalam peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Berangkat dari prinsip tersebut, maka hal tersebut tentu perlu untuk ditindaklanjuti oleh dinas terkait yang dalam hal ini salah satunya adalah Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar untuk dapat mengatur dan membina sumber daya manusia di Kawasan Wisata Penataran dan sekitarnya agar pengembangan Kawasan Wisata Penataran dapat berjalan dengan optimal.

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar berkaitan dengan hal ini berupaya dengan menggandeng kelompok sadar wisata (Pokdarwis) Desa Penataran dan untuk kedepan juga akan menggandeng masyarakat sekitar Kawasan Wisata Penataran untuk dapat menggerakkan usaha pariwisata dalam rangka pengembangan Kawasan Wisata Penataran. Berikut menurut penuturan Bapak Arinal Huda selaku Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar :

“Jadi untuk hal ini kita membina kelompok sadar wisata di Desa Penataran sana, kita sering mengadakan pelatihan – pelatihan, seperti pada tahun 2018 lalu kita adakan pelatihan marketing *online*, manajemen pengelolaan *homestay* dan pelatihan pemandu wisata, tahun ini insya’Allah akan kita

adakan lagi pelatihan pengelolaan *homestay*, karena potensi *homestay* di sana sangat besar sekali, selain itu kita kedepan juga akan mengajak masyarakat yang tinggal di sekitar KWP agar mau membuat *souvenir* yang bagus, yang *memorable* dan layak untuk dijual pada wisatawan yang ada di KWP. Selain ini sebagai wujud dari pembangunan nonfisik, harapannya kedepan masyarakat dapat memanfaatkan potensi yang ada untuk dapat menggerakkan perekonomian mereka, karena pariwisata ini kan sangat berkaitan dengan *fresh money*, masak wisatawan datang gak bawa uang”. (Wawancara tanggal 16 April 2019, pukul 08.40 – 09.10 WIB).

Pernyataan dari Bapak Arinal Huda tersebut sesuai dengan pernyataan dari Ibu Binti Fatimah selaku salah satu pengurus Pokdarwis Majapahit Desa Penataran.

Berikut pernyataan dari Ibu Binti Fatimah tersebut :

“Dispar kepada kami sangat-sangat pro aktif Mas, sejak berdirinya Pokdarwis Desa Penataran pada tahun 2017, kami selalu diajak pelatihan dan studi banding, bahkan kadang Dispar juga mengadakan jambore pokdarwis untuk diskusi bersama. Sekarang memang tinggal aplikasinya saja yang belum begitu jalan. Kita butuh lebih banyak teman untuk berfikir bersama dan bekerja bersama bagaimana supaya Penataran ini bisa lebih maju pariwisatanya”. (Wawancara tanggal 20 Juni 2019, pukul 08.40 – 09.15).

Berikut merupakan kegiatan pelatihan yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar pada tahun 2018 lalu yang dalam pelaksanaannya dengan menggandeng para pegiat wisata dan Kelompok Sadar Wisata di Kabupaten Blitar termasuk salah satunya Kelompok Sadar Wisata yang ada di Desa Penataran sebagai pesertanya :

Tabel 4.5 Kegiatan Pembinaan Pokdarwis dan Pegiat Wisata Kabupaten Blitar 2018

NO	KEGIATAN	TEMPAT	MATERI
1	Pelatihan Marketing <i>Online</i> (20-22 Februari 2018) Pemateri : - Nikon Community Jatim - Komunitas Bukalapak Blitar - Icon Plus - Blitar Creative Forum .	Gedung Bhakti Budaya, Disparbudpora Kabupaten Blitar, Jl. Ahmad Yani No.11, Kota Blitar	1. Pengenalan potensi marketing medsos 2. Teknik marketing <i>online</i> 3. Teknik fotografi dan videografi
2	Pelatihan Pemandu Wisata (26 September 2018) Pemateri : - Ketua Perhimpunan Pramuwisata Indonesia Jatim - Direktur Bamboo Academic Pare Kediri - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jatim	Ruang Perdana, Kantor Bupati Blitar, Jl. S.Supriyadi No. 17, Kota Blitar	1. Dasar – dasar teknik Pemandu Wisata 2. <i>Public Speaking</i> (Teori) 3. <i>Public Speaking</i> (Praktik)
3	Studi Banding dan Pelatihan Manajemen <i>Homestay</i> (1-2 Desember 2018) Pemateri : Pengelola dan Pokdarwis Desa Wisata Tembi	Desa Wisata Tembi, Kelurahan Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul	1. Penguatan kelembagaan desa wisata 2. Penataan destinasi wisata 3. Paket desa wisata 4. Manajemen pengelolaan <i>homestay</i>

Sumber : Olahan Peneliti, dari Disparbudpora Kabupaten Blitar, 2018.

Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel tersebut dapat diketahui bahwa terdapat tiga kegiatan pelatihan yang telah diselenggarakan oleh pihak Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar, yaitu pelatihan marketing *online*, pelatihan *homestay* dan pelatihan pemandu wisata. Selain itu juga terdapat foto dokumentasi dari kegiatan – kegiatan tersebut salah satunya adalah sebagai berikut :



Gambar 4.13 Peserta Pelatihan Manajemen *Homestay* Bagi Pokdarwis
Sumber : Dokumentasi Disparbudpora Kabupaten Blitar, 2018.

Berdasarkan pernyataan dari Bapak Arinal Huda tersebut dapat diketahui bahwa peran dari Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar dalam melakukan pembinaan di bidang pariwisata dalam rangka pengembangan Kawasan Wisata Penataran adalah dengan memberikan pembinaan berupa pelatihan – pelatihan bagi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di Desa Penataran. Hal itu dilakukan dengan menggandeng Pokdarwis Desa Penataran tersebut untuk mengikuti pelatihan – pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar.

Hal yang dilakukan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar tersebut sesuai dengan yang disebutkan dalam Bab VIII Pasal 30 Huruf h dan j Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang untuk menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten/kota serta berhak pula dalam menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata. Pelatihan yang telah dilaksanakan diantaranya adalah

pelatihan marketing *online*, manajemen *homestay* dan pelatihan pemandu wisata yang telah dilakukan tahun 2018 lalu dan untuk tahun 2019 ini Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar juga berencana akan dilakukan pelatihan manajemen *homestay* lagi. Kedepannya Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar juga akan mengajak masyarakat yang tinggal di sekitar Kawasan Wisata Penataran untuk membuat *souvenir* yang layak untuk dijual kepada para wisatawan Kawasan Wisata Penataran.

2. Faktor pendukung dan penghambat Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar dalam menyelenggarakan perannya mengembangkan Kawasan Wisata Penataran.

- a. Faktor Pendukung

Berkaitan dengan upaya pengembangan Kawasan Wisata Penataran berdasarkan penuturan dari Bapak Arinal Huda selaku Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar terdapat faktor yang sangat mendukung Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar dalam menjalankan perannya, berikut penuturan dari Bapak Arinal Huda tersebut :

“Faktor yang jadi pendorong bagi kami ya karena Pemerintah Daerah telah sepakat seperti yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Blitar bahwa pariwisata merupakan program unggulan Pemerintah Daerah. Hal ini merupakan kekuatan yang sangat luar biasa, karena apabila Pemerintah sudah fokus dalam pengembangan pariwisata seperti yang tertuang dalam RPJMD maka akan memudahkan bagi pelaksana di bawah seperti kami untuk menerapkan kebijakan tersebut”. (Wawancara tanggal 16 April 2019, pukul 08.40 – 09.10 WIB).

Strategi dan Arah Kebijakan Misi ke-5

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Meningkatnya produktivitas usaha masyarakat, koperasi, UMKM berbasis pertanian dan pariwisata	1. Meningkatkan daya saing usaha koperasi, UMKM	a. Peningkatan kualitas produk Koperasi dan UMKM. b. Peningkatan peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian masyarakat
		2. Mengembangkan industri kecil menengah, dan sentra industri potensial	a. Peningkatan jumlah industri kecil dan menengah, serta industri potensial b. Peningkatan penggunaan iptek dalam industri kecil dan menengah
		3. Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk pertanian	a. Peningkatan produksi pertanian dalam arti luas b. Pemanfaatan sarana, prasarana pertanian yang didukung penerapan teknologi.
		4. Mengembangkan destinasi pariwisata	a. Pengembangan destinasi Kawasan wisata Penataran, wisata agro dan edukasi, sertawisata alam b. Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana destinasi wisata. c. Pengembangan industri penunjang kepariwisataan dan desa wisata

Gambar 4.14 Pengembangan destinasi Kawasan Wisata Penataran dalam RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021

Sumber : RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa yang menjadi faktor pendukung atau penyokong Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar dalam menjalankan perannya untuk mengembangkan Kawasan Wisata Penataran adalah dicanangkannya pariwisata sebagai program unggulan oleh Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Blitar. Adanya penancangan pariwisata sebagai program unggulan daerah yang dituangkan dalam RPJMD, hal tersebut dianggap memudahkan pihak Dinas

Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar dalam menjalankan tugasnya mengembangkan pariwisata di Kabupaten Blitar yang salah satunya adalah Kawasan Wisata Penataran.

b. Faktor Penghambat

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar dalam upaya mengembangkan Kawasan Wisata Penataran masih terhambat oleh beberapa faktor. Berdasarkan penuturan dari pihak Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar yang dalam hal ini juga diwakili oleh Bapak Arinal Huda selaku Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata dalam dinas tersebut, beliau menyatakan bahwa :

“Secara eksternal, kami masih merasa kesulitan mengatur SDM pelaku wisata di sana, contohnya penerapan Sapta Pesona, untuk bersih saja masih kesulitan. Slogan bersih, indah, aman, nyaman dan tertib itu merupakan hal yang mudah untuk diucapkan tapi susah untuk diterapkan. Dalam hal bersih dan indah saja contohnya, kami masih sangat perlu untuk terus berjuang keras, karena ukuran yang nomor satu dalam destinasi wisata yang menarik itu adalah kebersihan, mau semegah dan semenarik apapun objek wisata apabila sampah berserakan maka akan menjadi tidak menarik, hal ini tentu menjadi tantangan bagi kami. Lalu kendala kita yang lain ya mengenai belum adanya ketersediaan *souvenir* yang dipasarkan. Maka dari itu kita kedepan juga perlu untuk mempengaruhi masyarakat sekitar agar mau membuat *souvenir* yang bagus, yang *memorable* dan layak untuk dijual pada wisatawan. Disamping secara internal SDM kami di kantor memang sangat terbatas, hanya sedikit sekali dari kami yang selalu bisa kontrol ke sana, jadi sangat sedikit sekali jumlah SDM dari Dinas Pariwisata ini”.(Wawancara tanggal 16 April 2019, pukul 08.40 – 09.10 WIB).

Berdasarkan pada hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa terdapat faktor penghambat dari sisi eksternal maupun internal organisasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar dalam menjalankan perannya dalam upaya pengembangan Kawasan Wisata Penataran.

Faktor penghambat Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar menjalankan perannya dalam pengembangan Kawasan Wisata Penataran dari sisi eksternal adalah masih susahnya para sumberdaya manusia pelaku wisata di Kawasan Wisata Penataran untuk diatur demi mewujudkan Sapta Pesona (aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan kenangan), khususnya terkait dengan kebersihan. Hal tersebut pun juga sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan oleh Peneliti di destinasi Kolam Renang Penataran, dalam area destinasi kolam renang terdapat sungai yang sangat kotor. Sampah yang terdapat di sungai tersebut kebanyakan adalah sampah plastik seperti sisa kemasan makanan dan minuman. Berikut merupakan foto hasil dokumentasi yang didapat oleh Peneliti saat melakukan observasi di Kawasan Wisata Penataran khususnya di area Kolam Renang Penataran :



Gambar 4.15 Sampah Pada Aliran Sungai Dalam Area Kolam Renang

Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2019

Selain itu juga masih belum adanya ketersediaan *souvenir* yang dipasarkan di Kawasan Wisata Penataran. Sedangkan faktor penghambat dari sisi internal adalah masih terbatasnya sumberdaya manusia dari Dinas Pariwisata,

Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar yang terdapat di kantor, sehingga sangat sedikit perwakilan dari kantor yang dapat melakukan kontrol ke Kawasan Wisata Penataran. Berkaitan dengan faktor penghambat dari sisi internal tersebut, Bapak Agus selaku petugas kebersihan *Amphitheater* Penataran, memberikan pernyataan sebagai berikut :

“Ya mungkin memang yang kekurangan SDM itu yang di kantor Mas, saya disini kan sebenarnya juga perwakilan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Blitar juga yang ditugaskan di *Amphitheater* ini, tapi meski begitu kan pihak kantor juga perlu untuk sering mengontrol keadaan di KWP ini juga. Dinas Pariwisata ini kan kerjanya gak kenal waktu Mas, meskipun hari libur, meski malam ya tetap kita ini bisa saja bertugas,. Biasanya pihak kantor yang sering mengontrol kesini itu Pak Huda Kabid Pengembangan Destinasi, beliau kesini bisa siang atau malam”. (Wawancara tanggal 23 April 2019, pukul 10.30 – 11.10 WIB).

Berdasar pada hasil wawancara peneliti dengan Bapak Arinal Huda dan Bapak Agus tersebut dapat diketahui bahwa kurangnya sumber daya manusia Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar lebih pada sumber daya manusia yang berdinamis di kantor, karena meskipun di Kawasan Wisata Penataran khususnya di destinasi Kolam Renang Penataran dan *Amphitheater* yang merupakan tanggung jawab penuh pihak Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar terdapat beberapa petugas dari dinas yang bertugas, namun pihak kantor tetap memiliki tanggung jawab untuk mengontrol keadaan lapangan yang sesungguhnya, dan sumber daya yang ada di kantor inilah yang dianggap masih kurang untuk dapat mengontrol ke Kawasan Wisata Penataran mengingat memang banyaknya destinasi wisata di Kabupaten Blitar yang juga perlu diperhatikan dan dikembangkan selain Kawasan Wisata Penataran.

C. Analisis Data Hasil Penelitian

1. Penyelenggaraan Peran Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar dalam pengembangan Kawasan Wisata Penataran
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

Berdasarkan data yang sudah peneliti sajikan, diketahui bahwa yang telah dilakukan oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar untuk menyelenggarakan perannya dalam hal perumusan kebijakan teknis berkaitan dengan pengembangan Kawasan Wisata Penataran adalah dengan merumuskan dan membuat *master plan* pengembangan Kawasan Wisata Penataran yang telah dilaksanakan pada tahun 2017 lalu. *Master plan* tersebut dibuat untuk menindaklanjuti kebijakan yang telah terlebih dahulu dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar tahun 2016-2021, yang mana dalam RPJMD tersebut pengembangan Kawasan Wisata Penataran merupakan salah satu arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Blitar tahun 2016-2021.

Master plan yang berisi analisis fisik dan nonfisik, *Digital Engineering Design* (DED) hingga rencana pembangunan di Kawasan Wisata Penataran tersebut diharapkan dapat menjadi patokan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar dalam mengembangkan Kawasan Wisata Penataran. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Abidin (2004:25) yang menyatakan bahwa kebijakan teknis adalah kebijakan yang bersifat operasional

dari kebijakan pelaksanaan, yang mana kebijakan pelaksanaan tersebut merupakan penjabaran dari kebijakan umum yang menjadi pedoman atau petunjuk utama baik yang bersifat positif maupun negatif yang meliputi seluruh wilayah kewenangan instansi yang bersangkutan. Apabila mengacu pada pendapat tersebut, maka yang dapat disebut sebagai kebijakan umum adalah kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Blitar yang mencanangkan pengembangan Kawasan Wisata Penataran sebagai salah satu obyek wisata yang dikembangkan, yang mana kebijakan tersebut tertuang dalam RPJMD Kabupaten Blitar tahun 2016-2017. Sedangkan renstra dan *master plan* pengembangan Kawasan Wisata Penataran Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar merupakan wujud dari kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis, meskipun masih terdapat kebijakan yang dapat dikatakan lebih bersifat teknis lagi yang berupa pelaksanaan dari pembangunan atau pengembangan tersebut secara konkrit.

Peran yang diselenggarakan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar tersebut juga sesuai dengan wewenang dari pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang terdapat dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata. Pasal tersebut menyebutkan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota berwenang menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota. Berdasarkan pasal tersebut, maka apa yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar dalam perumusan kebijakan teknis berupa *master plan* ini relevan dengan wewenangnya selaku bagian dari perangkat daerah Kabupaten Blitar.

Apabila dikaitkan dengan konsep pengembangan pariwisata, hal ini cukup relevan dengan pendapat Hasan (2016:16) yang menyatakan bahwa maksud dari pengembangan pariwisata pada intinya adalah ditujukan untuk mengembangkan atau memajukan objek wisata agar objek wisata tersebut lebih baik dan lebih menarik ditinjau dari segi tempat maupun benda-benda yang ada di dalamnya agar dapat menarik minat wisatawan untuk mengunjunginya. Relevansinya adalah isi atau konten dari *master plan* yang meliputi berbagai rencana pembangunan yang dilakukan merupakan wujud dari upaya Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar untuk membuat berbagai bangunan atau tempat dalam Kawasan Wisata Penataran dapat lebih menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan. Berdasarkan analisis singkat tersebut dan juga mengacu pada pendapat Soekanto (2002:243) yang menyatakan bahwa peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar dalam hal perumusan kebijakan teknis dapat dikatakan memang telah menyelenggarakan perannya sesuai dengan mandat yang tertuang dalam tugas pokok dan fungsinya.

b. Penyelenggaraan Urusan Pelayanan Umum Bidang Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

Berdasarkan data hasil penelitian yang telah dipaparkan, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar dalam hal penyelenggaraan pelayanan umum lebih berperan dalam hal pemenuhan dan pemanfaatan sarana dan prasarana dalam rangka pengembangan Kawasan Wisata Penataran.

Meskipun setelah dianalisis juga dengan komponen-komponen pariwisata, dapat diketahui pula bahwa Disparbudpora Kabupaten Blitar juga berperan melakukan kegiatan promosi. Pengembangan pariwisata itu sendiri dapat diukur dengan komponen-komponen pariwisata yang meliputi atraksi, aksesibilitas, amenitas dan layanan tambahan. Hal tersebut mengacu pada pendapat Cooper, dkk. dalam Sunaryo (2013:159) yang menyebutkan bahwa pengembangan destinasi pariwisata merupakan tindakan atau upaya yang meliputi pemenuhan komponen-komponen utama pariwisata yang meliputi *attraction*, *accessibility*, *amenities* dan *ancillary service*. Secara umum Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar bertanggung jawab atas sarana dan prasarana pada destinasi Kolam Renang Penataran, *amphitheater*, gedung film dan Museum Penataran. Sedangkan untuk destinasi Candi Penataran, pegawai hingga sarana dan prasarannya sepenuhnya merupakan bagian tanggung jawab dari BPCB.

Upaya pemenuhan sarana prasarana pariwisata untuk pemenuhan komponen-komponen pariwisata yang sudah dilakukan oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar adalah mulai dari pengadaan sarana prasarana dan hal – hal yang berupa bangunan fisik misalnya adalah pengadaan pengadaan gedung film yang berada tepat disebelah *amphitheater* pada tahun 2017 lalu dan kolam anak yang berada di dalam destinasi Kolam Renang Penataran sebagai pemenuhan komponen amenitas pariwisata. Kemudian juga ada pembangunan Patung Koi untuk menambah atraksi atau daya tarik wisata fisik, serta pembangunan taman trotoar dan pagar pembatas mulai dari patung Koi hingga Makam Syekh Subakir yang dilaksanakan tahun 2018 lalu sebagai wujud

dari upaya mempermudah aksesibilitas wisatawan Kawasan Wisata Penataran. Selain itu juga dilakukan upaya fasilitasi dalam hal publikasi atau promosi untuk beberapa *event* yang digelar di Kawasan Wisata Penataran, hal ini juga ditujukan untuk memenuhi aspek atraksi pariwisata dalam Kawasan Wisata Penataran. Disamping sejak awal Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar juga sudah menempatkan petugas teknis di Kawasan Wisata Penataran yang bertugas mengelola operasional dan melayani wisatawan Kawasan Wisata Penataran setiap harinya.

Hal tersebut tidak bertolak belakang dengan pengertian dari penyelenggaraan pelayanan umum itu sendiri, penyelenggaraan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pemeliharaan dan pengusahaan sesuatu, sedangkan pelayanan diartikan sebagai penyiapan atau penyediaan kebutuhan, sehingga penyelenggaraan urusan pelayanan dalam hal ini terkait dengan upaya pemeliharaan maupun pengusahaan berbagai kebutuhan di Kawasan Wisata Penataran dalam konteks pariwisata. Berbagai upaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar tersebut sesuai dengan amanat yang ada pada Bab I Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, yang menyatakan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar sebagai salah satu bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar dalam hal ini dapat diketahui sudah melakukan upaya penyediaan berbagai fasilitas pariwisata sebagai

bentuk pelayanan bagi wisatawan yang ada di Kawasan Wisata Penataran sesuai dengan destinasi yang menjadi tanggung jawabnya. Dikarenakan adanya tindakan dengan dasar yang jelas tersebut, maka dapat dikatakan peran yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar dalam Pengembangan Kawasan Wisata Penataran tersebut peneliti anggap relevan dengan pendapat Soekanto (2002:243) yang menyatakan bahwa peran merupakan aspek yang bersifat dinamis, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia sudah dapat disebut menjalankan suatu peranan.

Berdasarkan argumen tersebut dapat dikatakan bahwa peran yang dijalankan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar dalam penyelenggaraan pelayanan umum di Kawasan Wisata Penataran tersebut dapat dikatakan pula sebagai suatu upaya untuk memenuhi komponen – komponen dari pariwisata itu sendiri. Meskipun pada realitanya memang masih banyak aspek-aspek yang terdapat dalam komponen-komponen pariwisata tersebut yang belum terpenuhi semua, misalnya seperti penginapan, pusat *souvenir*, hingga moda transportasi wisata. Bahkan untuk yang berkaitan dengan pemenuhan aspek atraksi berupa *event* masih tergolong pasif karena cenderung menjadi mitra bagi pihak yang menyelenggarakan *event* rutin di Kawasan Wisata Penataran, dalam praktiknya pun cenderung membantu promosi yang dilakukan melalui sarana digital yang sudah dimiliki. Jadi dalam hal pemenuhan atraksi berupa *event*, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar lebih condong kepada optimalisasi sarana yang sudah dimiliki.

Secara umum Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar dalam menjalankan perannya dalam penyelenggaraan urusan pelayanan umum dilakukan dengan melakukan pemenuhan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pariwisata di Kawasan Wisata Penataran. Hal tersebut sesuai dengan konsep dasar pengembangan pariwisata yang dikemukakan oleh Hasan (2016:16), yang menyatakan bahwa maksud dari pengembangan pariwisata intinya adalah untuk mengembangkan atau memajukan objek wisata agar objek wisata tersebut lebih baik dan lebih menarik ditinjau dari segi tempat maupun benda-benda yang ada di dalamnya agar dapat menarik minat wisatawan untuk mengunjunginya. Berdasarkan argumen yang telah dipaparkan tersebut, dapat diketahui bahwa upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar dalam penyelenggaraan urusan pelayanan umum melalui penyediaan dan pemanfaatan sarana prasarana dalam rangka pengembangan Kawasan Wisata Penataran tersebut sesuai dengan maksud dari pengembangan pariwisata itu sendiri serta tidak bertentangan dengan tugas pokok dan fungsinya.

c. Pembinaan di Bidang Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

Peran dari Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar dalam hal pembinaan di bidang pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olahraga dalam rangka pengembangan Kawasan Wisata Penataran diselenggarakan dengan membina sumber daya manusia sekitar Kawasan Wisata Penataran. Upaya tersebut dilakukan dengan memberikan pembinaan berupa pelatihan bagi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Penataran. Pelatihan

yang telah diberikan diantaranya adalah pelatihan marketing *online*, manajemen *homestay* dan pelatihan pemandu wisata yang telah dilaksanakan tahun 2018 lalu dan untuk tahun 2019 ini kembali juga akan dilakukan pelatihan manajemen *homestay*. Kedepannya Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar juga berencana akan mengajak dan membujuk masyarakat yang tinggal di sekitar Kawasan Wisata Penataran untuk membuat *souvenir* yang menarik dan layak untuk dijual kepada para wisatawan yang mengunjungi Kawasan Wisata Penataran.

Peran yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar tersebut relevan dengan apa yang disebutkan dalam Bab VIII Pasal 30 Huruf h dan j Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang untuk menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten/kota serta berhak pula dalam menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata. Hal tersebut pun juga sesuai dengan fungsi dari Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar itu sendiri yang mana diantara fungsinya adalah melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan, pengembangan sadar wisata dan pengembangan potensi masyarakat.

Sedangkan apabila dikaitkan dengan konsep pengembangan pariwisata, upaya pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar kepada Pokdarwis tersebut sesuai dengan pendapat Soekadijo dalam Rahman (2010:11) yang menyebutkan bahwa salah satu tujuan dari

pengembangan pariwisata adalah mengubah industri-industri baru yang berkaitan dengan jasa-jasa wisata. Misalnya, usaha transportasi, akomodasi (hotel, motel, pondok wisata, perkemahan, dan lain-lain), sehingga fokus atau pemahaman masyarakat terhadap peluang pengembangan pariwisata dari sisi ekonomi tidak hanya berkaitan dengan usaha perdagangan *souvenir* saja, meskipun usaha penjualan *souvenir* juga adakalanya diperlukan untuk memberikan ciri khas bagi tempat wisata.

Upaya untuk mengajak atau membujuk masyarakat sekitar Kawasan Wisata Penataran untuk membuat *souvenir* yang menarik, *memorable* dan layak untuk dijual pun juga direncanakan oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar untuk kedepannya. Hal ini juga relevan dengan pendapat dari Soekadijo dalam Rahman (2010:11) yang juga menyebutkan bahwa tujuan dari pengembangan pariwisata juga untuk memperluas pasar barang-barang lokal. Upaya mengajak dan membujuk masyarakat sekitar Kawasan Wisata Penataran untuk membuat *souvenir* khas Kawasan Wisata Penataran yang menarik dan kemudian memasarkannya ini tentu merupakan salah satu refleksi atau gambaran dari salah satu tujuan pengembangan pariwisata tersebut, sehingga diharapkan untuk kedepannya produk masyarakat lokal dapat terpasarkan kepada para wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Pada akhirnya semua itupun pada intinya juga ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, yang mana hal inipun juga sesuai dengan pendapat dari Nugroho (2015:214) yang menyatakan bahwa pengembangan pariwisata salah satunya juga ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat lokal.

Selain itu hal tersebut juga merupakan wujud dari upaya untuk memenuhi komponen pariwisata yaitu *ancillary service* yang menurut Sugiama dalam Khotimah (2017:59) dijelaskan bahwa *ancillary service* mencakup keberadaan berbagai organisasi atau kelompok tertentu untuk mendorong pengembangan serta pemasaran kepariwisataan destinasi bersangkutan. Peneliti pun juga menganggap langkah tersebut untuk kedepan juga dapat berpengaruh terhadap pemenuhan komponen pariwisata yang lain yaitu *amenities*, yang mana amenities pariwisata tersebut di dalamnya juga meliputi ketersediaan tempat perbelanjaan yang salah satunya bisa jadi adalah pusat *souvenir*. Berdasarkan berbagai argumen tersebut, dapat diketahui bahwa peran yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar dalam hal pembinaan di bidang pariwisata dengan membina Kelompok Sadar Wisata Desa Penataran tersebut sejalan dengan tujuan dari pengembangan pariwisata dan sinkron dengan wewenang, tugas pokok serta fungsinya.

2. Faktor pendukung dan penghambat Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar dalam menyelenggarakan perannya mengembangkan Kawasan Wisata Penataran.

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar dalam menyelenggarakan perannya untuk mengembangkan Kawasan Wisata Penataran berdasarkan data yang sudah peneliti sajikan dapat diketahui yaitu dicanangkannya pariwisata sebagai program unggulan oleh Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Blitar. Adanya

pencanangan pariwisata sebagai program unggulan daerah yang kemudian dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Blitar, hal tersebut dianggap memudahkan pihak Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar dalam menjalankan tugasnya mengembangkan pariwisata di Kabupaten Blitar yang salah satunya adalah Kawasan Wisata Penataran. Hal tersebut dapat dipahami dikarenakan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar selaku salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Blitar dalam perencanaan strategisnya harus mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah yang menjabat yang mana visi dan misi tersebut dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar.

Berdasarkan data yang sudah disajikan, diketahui bahwa terdapat salah satu strategi yaitu strategi mengembangkan destinasi pariwisata, dan pada strategi tersebut terdapat salah satu arah kebijakan yaitu pengembangan Kawasan Wisata Penataran. Berdasarkan data tersebut pihak Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar selaku pelaksana kebijakan teknis merasa dimudahkan dikarenakan memiliki dasar hukum yang jelas, sehingga tidak heran apabila direncanakan setiap tahun akan ada pembangunan di Kawasan Wisata Penataran.

b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar dalam menyelenggarakan perannya mengembangkan Kawasan Wisata Penataran secara garis besar terbagi menjadi dua, yaitu faktor penghambat

dari sisi eksternal dan dari sisi internal Dinas. Pada sisi eksternal, faktor penghambatnya adalah masih sulitnya sumber daya manusia pelaku wisata di Kawasan Wisata Penataran untuk diatur demi mewujudkan Sapta Pesona (aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan kenangan), khususnya terkait dengan kebersihan. Selain itu juga masih terbatasnya ketersediaan *souvenir* yang dipasarkan di Kawasan Wisata Penataran. Suatu pengembangan pariwisata dalam prosesnya memang perlu untuk melibatkan masyarakat atau pelaku wisata pada objek atau destinasi wisata yang dikembangkan. Ini dikarenakan salah satu tujuan dari pengembangan pariwisata adalah untuk mensejahterakan atau memberi keuntungan bagi masyarakat khususnya masyarakat sekitar kawasan wisata yang dikembangkan.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Marpaung dalam Rahman (2010:12) yang mengemukakan bahwa pengembangan kepariwisataan ditujukan untuk memberikan keuntungan baik bagi wisatawan maupun warga setempat. Berdasarkan pendapat tersebut dapat tersebut maka apabila ada sumber daya manusia pelaku wisata yang ada di Kawasan Wisata Penataran yang sulit diatur untuk menjaga kebersihan tentu akan berpotensi dapat merusak lingkungan dan membuat wisatawan yang berkunjung menjadi tidak nyaman atau terganggu apabila banyak sampah berserakan, sehingga proses pengembangan pun juga bisa jadi terhambat karena hal tersebut. Berkaitan dengan belum tersedianya *souvenir* yang dapat dipasarkan, hal tersebut berkaitan dengan salah satu komponen pariwisata yaitu amenitas, yang mana amenitas tersebut menurut Sugiama (2011) dalam Khotimah (2017:59) meliputi berbagai fasilitas untuk memenuhi kebutuhan

wisatawan yang salah satunya adalah tempat perbelanjaan (*retailing*) bagi wisatawan. Meskipun mungkin ada tempat perbelanjaan umum yang ada, namun yang perlu juga diingat adalah bahwa salah satu tujuan pengembangan pariwisata adalah untuk kesejahteraan penduduk lokal dan pengkayaan budaya (Nugroho, 2015). Oleh karena itu, belum tersedianya souvenir yang dipasarkan di Kawasan Wisata Penataran mungkin tidak akan menghentikan jalannya proses pengembangan pariwisata yang dilakukan, namun hal tersebut dapat dianggap sebagai salah satu indikator kurang optimalnya pengembangan Kawasan Wisata Penataran.

Sedangkan faktor penghambat dari sisi internal adalah masih terbatasnya sumberdaya manusia dari Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar yang terdapat di kantor dinas, sehingga sangat sedikit perwakilan dari kantor dinas yang dapat melakukan kontrol ke Kawasan Wisata Penataran. Kontrol merupakan sesuatu yang penting, mengacu pada pendapat dari Jones dalam Mahsun (2009:8-9) yang menyebutkan bahwa salah satu peran dari organisasi sektor publik adalah *direct provision of goods and service*, yang mana peran sektor publik adalah ikut mengendalikan dan mengawasi sejumlah proses pengadaan barang dan atau jasa publik. Seperti yang diketahui bahwa dalam pengembangan Kawasan Wisata Penataran ini Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar perlu banyak berkoordinasi dengan salah satunya adalah BPCB yang mengelola Candi Penataran dan Museum Penataran. Tentu apabila dikaitkan dengan pernyataan pihak pengelola Museum Penataran yang sudah peneliti sajikan berkaitan dengan masih adanya beberapa kekurangan

dari peran Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar selaku pihak yang bertanggung jawab terhadap sarana dan prasarana Museum Penataran, tentu dapat diasumsikan bahwa bisa saja itu juga disebabkan karena kurangnya kontrol dari pihak kantor Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar untuk terjun langsung ke lapangan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data hasil penelitian dan analisis terhadap data hasil penelitian yang telah disampaikan, poin – poin kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar dalam pengembangan Kawasan Wisata Penataran berdasarkan tupoksinya berperan dalam hal perumusan kebijakan teknis yang dilakukan dengan merumuskan *master plan* pengembangan Kawasan Wisata Penataran, penyelenggaraan urusan pelayanan umum yang dilakukan dengan melakukan pemenuhan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pariwisata serta dalam hal pembinaan di bidang pariwisata yang dilakukan dengan membina Pokdarwis “Majapahit” Desa Penataran.
2. Banyak sarana prasarana Museum Penataran yang perlu ditingkatkan, seperti pemasangan layanan *Wi-fi* hingga penambahan ruang untuk *display* koleksi yang berjumlah 400an yang masih tersimpan di dalam gudang;
3. Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana Museum Penataran terkadang masih terlambat;
4. Berkaitan dengan aspek aksesibilitas, terdapat kekurangoptimalan dalam pengadaan sarana penunjuk arah, dibuktikan dengan belum adanya plang penunjuk arah yang mengarahkan ke destinasi Museum Penataran dan terdapat plang penunjuk arah yang kondisinya sudah rusak sehingga

tulisannya sulit terbaca. Selain itu pada aplikasi Amazing Blitar juga belum terdapat pilihan destinasi Museum Penataran;

5. Belum tersedianya tempat pusat oleh-oleh dan *souvenir* sebagai bagian dari komponen *amenities*;
6. Kondisi sungai di dalam area Kolam Renang Penataran kotor, terdapat banyak sampah plastik;
7. Belum ada program atau kegiatan promosi secara khusus dari Disparbudpora Kabupaten Blitar untuk mempromosikan Kawasan Wisata Penataran;
8. Masih belum adanya program atau kegiatan pembinaan Pokdarwis Desa Penataran secara khusus;
9. Masih belum berjalannya peran Pokdarwis Desa Penataran dalam Pengembangan Kawasan Wisata Penataran;
10. Kurangnya sumber daya manusia dari kantor Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga yang bisa rutin *cross check* ke Kawasan Wisata Penataran;
11. Pelaksanaan pembangunan di Kawasan Wisata Penataran tidak sepenuhnya sesuai dengan tahapan pembangunan di *master plan* pengembangan Kawasan Wisata Penataran
12. Adanya program pengembangan Kawasan Wisata Penataran di RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021 menjadi faktor pendukung Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemda dan Olahraga Kabupaten Blitar dalam mengembangkan Kawasan Wisata Penataran.

B. Saran

Berikut merupakan saran yang diberikan oleh peneliti mengacu pada kesimpulan dari penelitian yang telah peneliti lakukan :

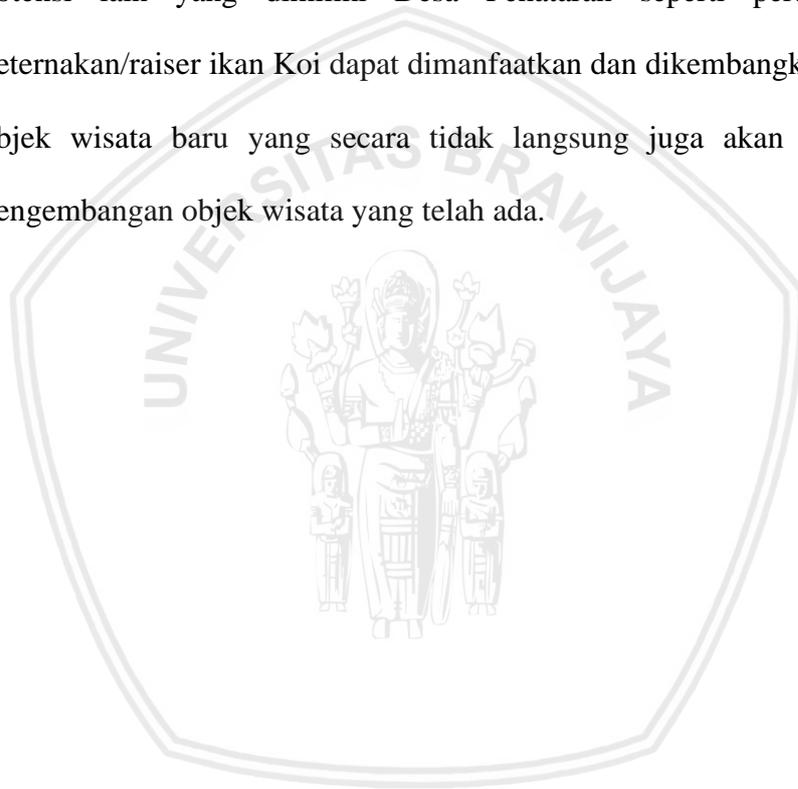
1. Area Kawasan Wisata Penataran khususnya zona Kolam Renang Penataran yang sebagian besar merupakan tanggung jawab dari Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar perlu untuk dijadikan area *hotspot* sehingga para wisatawan dapat mengakses layanan *Wi-fi*. Fasilitas tersebut sangat diperlukan untuk menambah daya tarik dan untuk meningkatkan kenyamanan dari para wisatawan. Peneliti menganggap adanya area *hotspot* di Kawasan Wisata Penataran ini dapat dijadikan langkah awal untuk mengupayakan promosi secara *digital*. Diharapkan dengan adanya fasilitas tersebut dapat menjadikan para wisatawan menjadi lebih mudah pula untuk menyebarluaskan atau membagikan *update* dari lokasi dan aktivitas wisatanya di Kawasan Wisata Penataran, sehingga dengan begitu dapat membantu proses promosi pariwisata dan nama Kawasan Wisata Penataran diharapkan dapat lebih dikenal dan *familiar* di dunia maya atau sosial media.
2. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar bersama instansi terkait lainnya perlu untuk mengupayakan adanya tempat khusus di dalam area Kawasan Wisata Penataran yang dapat dijadikan galeri produk-produk UMKM khas Kabupaten Blitar, sehingga dengan begitu upaya realisasi pengembangan UMKM berbasis pariwisata pun juga dapat terwujud tanpa harus menunggu menggerakkan masyarakat setempat

untuk membuat dan memasarkan *souvenir* buaatannya seperti rencana pihak Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar kedepannya. Selain itu tersedianya *space* atau ruang untuk galeri produk UMKM Kabupaten Blitar tersebut harapannya kedepan juga dapat dijadikan tempat untuk memasarkan *souvenir* produksi masyarakat sekitar apabila kelak rencana dari Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar tersebut terealisasi.

3. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar untuk memudahkan perannya dalam mengawasi pengembangan Kawasan Wisata Penataran perlu untuk mulai menggunakan teknologi *Online CCTV* sebagai sarana pembantu kontrol lapangan yang sistem pengawasannya dapat terintegrasi dan diakses dari kantor Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar. Penggunaan *CCTV* tersebut selain dapat meningkatkan keamanan juga dapat digunakan sebagai langkah awal untuk menindak para pelaku wisata yang membuang sampah sembarangan di sungai area kolam renang.
4. Perlu adanya koordinasi dengan instansi terkait untuk dilakukan penambahan plang penunjuk arah terutama untuk plang penunjuk arah ke Museum Penataran yang belum ada sama sekali. Selain itu juga perlu dilakukan perbaikan atau penggantian plang penunjuk arah yang sudah rusak.
5. Dinas Pariwisata perlu melakukan pendampingan kepada Pokdarwis di Desa Penataran agar lebih terlibat langsung pada pengembangan Kawasan

Wisata Penataran, sehingga Pokdarwis Desa Penataran dalam hal ini tidak hanya berperan sebagai objek pelatihan saja.

6. Perlu diadakannya program Desa Wisata di Desa Penataran secara lebih serius dan lebih melibatkan masyarakat, sehingga objek wisata di Desa Penataran tidak terfokus hanya pada Kawasan Wisata Penataran. Berbagai potensi lain yang dimiliki Desa Penataran seperti pertanian dan peternakan/raiser ikan Koi dapat dimanfaatkan dan dikembangkan menjadi objek wisata baru yang secara tidak langsung juga akan menunjang pengembangan objek wisata yang telah ada.



DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. 2004. *Kebijakan Publik*. Jakarta : Yayasan Pncur Siwah.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar. 2015. “Luas Wilayah, Penduduk DAN Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan 2014”, diakses pada 20 April 2019 dari <https://blitarkab.bps.go.id/statictable/2015/02/25/361/luas-wilayah-penduduk-dan-kepadatan-penduduk-menurut-kecamatan-2014.html>.
- Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar. “*Struktur Organisasi*”, diakses pada 20 April 2019 dari http://disparbudpora.blitarkab.go.id/?page_id=260.
- Geriya, I Wayan. 1995. *Pariwisata dan Dinamika Kebudayaan Lokal, Nasional, Global : Bunga Rampai Antropologi Pariwisata*. Denpasar : Upada Sastra.
- Ghani, Yosef Abdul. 2017. Pengembangan Sarana Prasarana Destinasi Pariwisata Berbasis Budaya di Jawa Barat. *Jurnal Pariwisata*, 4 (1) 22 31.
- Hasan, Shandi M. 2016. “Strategi Pengembangan Wisata Kota Cirebon Menuju Destinasi Utama Wisata Religi”. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Herat, Rizki Andini, dkk. 2015. Peran Bidang Promosi dan Pemasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Pulau Murotai dalam Mempromosikan Potensi Pariwisata Kabupaten Pulau Murotai. e-journal “Acta Diurna”, 4 (4).
- Ismayanti. 2010. *Pengantar Pariwisata*. Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Kabupaten Blitar. 2013. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar Tahun 2011-2031. Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2013 Nomor 3/E. Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar. Blitar.
- Kabupaten Blitar. 2016. Peraturan Bupati Kabupaten Blitar Nomor 64 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar. Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar, Blitar.
- Kabupaten Blitar. 2016. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021. Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 4/E. Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar. Blitar.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2016. KBBI Daring diakses pada 3 Juli 2019 dari www.kbbi.kemdikbud.go.id.
- Khotimah, Khusnul, dkk. 2017. Strategi apa pengembangan Destinasi Pariwisata Budaya (Studi Kasus Pada Kawasan Situs Trowulan Sebagai Pariwisata Unggulan di Kabupaten Mojokerto). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 41 (1) : 56 65.
- Kimsariwanto. 2011. “*Berbagai Peta Kabupaten Blitar*”, diakses pada 20 April 2019 dari <http://kim-bumipenataran.blogspot.com/2011/04/berbagai-peta-kabupaten-blitar.html>.
- Koentjaraningrat. 2004. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta : PT Rineka Cipta

- Kuncoro, Mudrajad. 2010. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta : Erlangga.
- Labolo, Muhadam. 2006. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Mahsun, Mohamad. 2009. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : BPFPE.
- Manafe, Janri D., dkk. 2016. Pemasaran Pariwisata Melalui Strategi Promosi Objek Wisata Alam, Seni dan Budaya (Studi Kasus di Pulau Rote NTT). *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 4 (1) 101-123.
- Miles, M.B., Huberman, A.M. dan Saldana J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA : Sage Publications.
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Muljadi, A. J. dan Andri Warman. 2014. *Kepariwisata dan Perjalanan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Mustikawati, dkk. 2017. Analisis Pengembangan Sarana Prasarana Obyek Wisata Alam Telaga Ngebel dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 53 (2) : 1-10.
- Nawang Sari, Dyanita, dkk. 2018. Pengembangan Wisata Pantai Desa Watu Karung dan Desa Sendang Kabupaten Pacitan Tahun 2017. *Jurnal GeoEco*, 4 (1) : 31-40.
- Ndraha, Taliziduhu. 2000. *Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Nita. 2018. "Minim Peminat, Museum Penataran Segera Ditata Ulang", diakses pada tanggal 22 Februari 2019 dari <https://mayangkanews.com/minim-peminat-museum-penataran-segera-ditata-ulang/>.
- Novalina, Lifska. 2008. "Peranan Promosi Wisata di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bandung dalam Meningkatkan Motivasi Wisatawan Terhadap Kota Bandung dan Sekitarnya". Tugas Akhir. Program Studi Bahasa Jepang, Fakultas Bahasa, Universitas Widyatama Bandung.
- Nugroho, Iwan. 2015. *Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Pitana, I Gde dan Gayatri. 2005. *Sosiologi Pariwisata*. Yogyakarta : ANDI.
- Prabowo, Dhanu Priyo, dkk. 2003. *Pengaruh Islam dalam Karya-Karya R. Ng. Ranggawarsita*. Yogyakarta : NARASI.
- Prasadj, Buddy. 2006. *Pembangunan Desa dan Masalah Kepemimpinannya*. Rajawali. Jakarta.
- Prasetyo, Aji. 2016. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Wisatawan Dalam Berkunjung Ke Obyek Wisata Waduk Gajah Mungkur Wonogiri". Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Prasodjo, Tunggul. 2017. Pengembangan Pariwisata Budaya dalam Perspektif Pelayanan Publik. *Jurnal Office*, 3 (1) : 8-12.

- Putri, Seprianti Eka. 2014. Persepsi Konsumen Terhadap Bauran Promosi (Promotional Mix) Pada Matahari Department Store Bengkulu. *Management Insight*, 9 (1) 45 54.
- Rahman, M. Azizur. 2010. "Analisis Strategi Pengembangan Kawasan Wisata dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai". Tesis. Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan.
- Ramli, Rully. 2019. "2019, Devisa dari Sektor Pariwisata Ditargetkan Rp246 Triliun", diakses pada 23 Mei 2019 dari <https://www.inews.id/finance/makro/2019-devisa-dari-sektor-pariwisata-ditargetkan-capai-rp246-triliun/489713>.
- Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2017. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta.
- Sakti, Guntur. 2019. "Siaran Pers:Menpar Targetkan Pariwisata Hasilkan Devisa 17,6 Miliar Dolar AS", diakses pada 20 Juni 2019 dari <http://www.kemenpar.go.id/post/siaran-pers-menpar-targetkan-pariwisata-hasilkan-devisa-176-miliar-dolar-as>.
- Sedarmayanti. 2016. *Membangun dan Mengembangkan Kebudayaan dan Industri Pariwisata*. Bandung : Refika Aditama.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Sosiologi : Suatu Pengantar*. Jakarta : Raja Persada
- Spillane, James. J. 1987. *Pariwisata Indonesia Sejarah dan Prospeknya*. Yogyakarta : Kanisius.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sunaryo, Bambang. 2013. *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta : Gava Media.
- Suranny, Lilyk Eka. 2017. Analisis Komponen Daya Tarik Wisata Pada Destinasi Wisata Kampung Wayang Kepuhsari Kabupaten Wonogiri. *Bappeda dan Litbang Kabupaten Wonogiri*, 43 49.
- Utama, I Gusti Bagus R. 2014. *Pengantar Industri Pariwisata : Tantangan & Peluang Bisnis Kreatif*. Yogyakarta : Deepublish.
- Wanda, Ida Bagus K. Dan Edriana Pangestuti. 2018. Pengaruh Komponen Destinasi Wisata Terhadap Kepuasan Pengunjung. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 55 (3) 83 91.
- Yustiana, Kurnia. 2017. "3 Program Utama Kemenpar untuk Capai Kunjungan Turis di 2019", diakses pada 23 Mei 2019 dari <https://travel.detik.com/travel-news/d-3470135/3-program-utama-kemenpar-untuk-capai-target-kunjungan-turis-di-2019>.

LAMPIRAN



Lampiran 1. Candi Penataran
Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2019.



Lampiran 2. Halaman Museum Penataran
Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2019.



Lampiran 3. Tampak Depan Destinasi Kolam Renang Penataran
Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2019.



Lampiran 4. Salah Satu Wahana di Kolam Renang Penataran
Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2019.



Lampiran 5. Pujasera Kolam Renang Penataran
Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2019.



Lampiran 6. Tampilan Awal Aplikasi Amazing Blitar
Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2019.



Lampiran 7. Aplikasi Amazing Blitar
Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2019.



Lampiran 8. Bentuk Promosi Melalui Website
Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2019.



Lampiran 9. Pelatihan Pemandu Wisata
Sumber : Dokumentasi Disparbudpora Kabupaten Blitar, 2018.



Lampiran 10. Pamflet Pelatihan Marketing Online
Sumber : Disparbudpora Kabupaten Blitar, 2018.



Lampiran 11. Peneliti bersama Bapak Arinal Huda, Kabid Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata

Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2019.



Lampiran 12. Bapak Masuri, Petugas BPCB di Candi Penataran

Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2019.



Lampiran 13. Kirab Tumpeng Agung Nusantara tahun 2018

Sumber : dokumentasi.blitarkab.go.id



Lampiran 14. Pesona Bumi Penataran tahun 2018

Sumber : Disparbudpora Kabupaten Blitar, 2018.



Lampiran 15. Festival Penataran Kuliner Interasional tahun 2018

Sumber : Disparbudpora Kabupaten Blitar, 2018.